

# UNDUH MAJALAH ARSIP DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)
2. Klik menu “Publikasi”
3. Kemudian pilih “Majalah ARSIP”
4. Unduh *file* “Majalah ARSIP”
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format* (PDF) dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat

EDISI 71/JANUARI-APRIL/2017



# ARSIP

Media Kearsipan Nasional

## GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

ANRI-MAJALAH ARSIP

GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

EDISI 71/JANUARI-APRIL 2017





**PUSAT  
JASA  
KEARSIPAN**

Arsip Nasional Republik Indonesia

*Mitra Terpercaya  
dalam Pengelolaan Arsip*



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi:

- (a) Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- (b) Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan;
- (c) Pembenahan arsip;
- (d) Pemeliharaan dan perawatan arsip;
- (e) Penyimpanan arsip.

Informasi Lebih Lanjut  
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:  
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta  
12560 - Indonesia  
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506  
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812  
Email : pusat.jasa@gmail.com  
www.jasakearsipan.anri.go.id



**KUNJUNGI...**  
**GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT**

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:  
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film  
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



# DAFTAR ISI



## 5 **SADAR TERTIB ARSIP SANGAT DIPENGARUHI GERAKAN SDM KEARSIPAN**

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat, tak terkecuali pemerintah melalui tiga pilar yang menjadi tujuan pembentukan GNSTA. Pertama, membangun kesadaran pentingnya mengelola arsip. Kedua, membangun penyelenggaraan tertib arsip. Ketiga, menyelamatkan arsip di seluruh kementerian/lembaga.

**DARI REDAKSI** ————— **4**

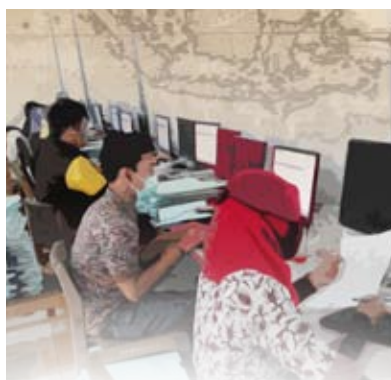
**ARTIKEL LAPORAN UTAMA** ————— **15**  
**TERTIB ARSIP PILKADA**

**KHAZANAH** ————— **17**  
**MENELUSURI DOKUMEN GENELOGI DI DALAM ARSIP LANDSARCHIEF**

**PROFIL** ————— **20**  
**BOEDI MARTONO: PENULIS KEARSIPAN YANG TAK LEKANG ZAMAN**

**PRESERVASI** ————— **22**  
**E-DEPOT ANRI**

**DAERAH** ————— **27**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA JOGJA TERBITKAN EMPAT BUKU PUBLIKASI KEARSIPAN TOKOH SENI DAN BUDAYA**



## 10 **MEMBANGUN NEGERI SADAR TERTIB ARSIP**

Membangun negeri sadar arsip bukanlah hal yang mudah. Tantangannya sungguh luar biasa. Arsip dalam sudut pandang manapun tidak akan menarik perhatian jika hanya dipandang sebagai produk samping dari proses administrasi. Tak heran jika masyarakat masih belum menyadari pentingnya arsip bagi kehidupan mereka.

**MANCA NEGARA** ————— **29**

**NGA TAONGA SOUND AND VISION: PENJAGA ARSIP FILM DI SELANDIA BARU**

**HUKUM** ————— **32**

**PENJAGA AUTENTIKASI ITU BERNAMA TATA NASKAH DINAS**

**TEKNOLOGI** ————— **34**

**HARD DISK STORAGE WORM PILIHAN TEPAT Mendukung PELESTARIAN ARSIP DALAM F**

**VARIA** ————— **38**

**INDONESIA VISUAL ART ARCHIVES (IVAA): GERAKAN SADAR ARSIP PARA SENIMAN YOGYAKARTA**

**VARIA** ————— **41**

**SERUNYA ARSIP DALAM DUNIA ANAK DI BELANDA**



## 12 **SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP**

Sinerji merupakan kata yang sering kali disebutkan, dalam beberapa hal yang sifatnya kerjasama kata sinerji memberi kekuatan bahwa kita tidak melaksanakan sendiri sebuah tujuan yang dicita-citakan ada kekuatan lain yang mendorong untuk bersama mewujudkannya. Dalam dunia kearsipan tujuan itu terbentang jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

**CERITA KITA** ————— **44**

**MEMBANGUN KEMBALI KEJAYAAN**

**LIPUTAN** ————— **47**



Cover Designer : Isanto

### KETERANGAN COVER

Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur didampingi oleh Pimpinan ANRI di Hotel Redtop, Jakarta. 17 Agustus 2016. (Dok. HM. ANRI)

### **Pembina:**

Kepala ANRI,  
Sekretaris Utama ANRI,  
Deputi Bidang Konservasi Arsip,  
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,  
Deputi Bidang Informasi dan  
Pengembangan Sistem Kearsipan

### **Penanggung Jawab:**

Syaifuddin, SE, MM

### **Pemimpin Redaksi:**

Gurandhyka, SIP.

### **Wakil Pemimpin Redaksi:**

Dhani Sugiharto, M.Kom.

### **Dewan Redaksi:**

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,

M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si,

Drs. Langgeng Sulistyono B

### **Redaktur Pelaksana:**

Bambang Barlian, S.AP.

Susanti, S.Sos., M.Hum.

### **Editor:**

Aria Maulana, S.Hum., MAP.

Rayi Darmagara, SH.

R. Suryagung Sudibyo P., S.S, M.Hum.

Drs. Muhammad Rustam

Intan Lidwina, S.Hum., MA

Annawaty Betawinda, S.Ikom

### **Fotografer:**

Muhamad Dullah, S.Sos

Lukman Nul Hakim

### **Desain Grafis:**

Beny Oktavianto, A.Md

Isanto, S.Ikom

### **Sekretariat:**

Khoerun Nisa Fadillah, S.IP.

Yuanita Utami, S.IP.

Krestiana Evelyn, A.Md

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), email: [humas@anri.go.id](mailto:humas@anri.go.id)



Tim Redaksi

**G**erakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) suatu gerakan yang terencana dan masif dalam upaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola arsip dan tertib arsip. Hasil audit kearsipan yang dilakukan ANRI pada tahun 2016 lalu, memperlihatkan hanya ada dua lembaga negara dan dua pemerintahan daerah provinsi yang bernilai baik, selebihnya bernilai cukup dan buruk. Fakta tersebut menguatkan bahwa arsip masih dipandang sebelah mata oleh pimpinan lembaga negara dan pemerintah daerah provinsi sehingga penyelenggaraan kearsipannya kurang tertib. ANRI selaku instansi pembina kearsipan dipandang perlu memelopori GNSTA. Apa dan bagaimana implementasi GNSTA? pada terbitan majalah ARSIP edisi kali ini mengupas tuntas mengenai GNSTA.

Pada rubrik laporan utama, kami hadirkan para nara sumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan GNSTA. Ulasan mendalam mengenai GNSTA disajikan dalam rubrik Artikel Laporan Utama meliputi upaya membangun negeri sadar arsip, sinergitas penyelenggaraan kearsipan dan tertib arsip pilkada.

Upaya menemukan jati diri pribadi, kami sajikan arsip genealogi dalam Rubrik Khazanah yang menitikberatkan kepada pencarian jejak asal usul seseorang melalui garis darah. Tim Majalah ARSIP berhasil mewawancarai sang begawan penulis buku kearsipan Boedi Martono yang dimuat pada Rubrik Profil. Kami pun juga menampilkan E-Depot pada Preservasi, Empat Publikasi Kearsipan Tokoh Seni dan Budaya yang diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jogja pada Rubrik Daerah. Rubrik Mancanegara sejenak kita menengok Penjaga Arsip Film di Selandia Baru dan Rubrik Hukum memuat Penjaga Autentikasi Itu Bernama Tata Naskah Dinas. Tak lupa pula, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi

# SADAR TERTIB ARSIP SANGAT DIPENGARUHI GERAKAN SDM KEARSIPAN

**P**etikan yang pernah dibacakan oleh Soeharto Presiden RI kedua dalam Seminar *Tropical Archivology* (1969) sekiranya pantas menjadi pembuka akan pentingnya pengelolaan arsip. Petikan tersebut berbunyi “ ... Apabila dokumen-dokumen negara terserak pada berbagai tempat, tanpa adanya suatu mekanisme yang wajar, yang dapat menunjukkan adanya dokumen-dokumen tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan, semata-mata karena tidak disadari nilai dokumen-dokumen negara tersebut oleh sementara pejabat, maka pemerintah tentu akan menanggung akibat daripada hilangnya informasi, yang dapat menyulitkan pemerintah dalam usahanya memberi pelayanan kepada rakyat sebagai pemerintah yang baik”. Dari petikan tersebut dipahami bahwa informasi yang terdapat dalam

dokumen atau arsip sangat penting untuk kegiatan penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu pentingnya kesadaran akan pengelolaan arsip mutlak diperlukan, karena kelalaian terhadap penanganan arsip berakibat kebocoran informasi atau hilangnya informasi, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sebenarnya telah mengatur dan bahkan mewajibkan setiap lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan perguruan tinggi negeri untuk mengelola arsipnya dari sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, hingga penyusutan guna menjamin ketersediaan arsip

dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Namun, minimnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip dikalangan masyarakat maupun birokrasi pemerintahan khususnya, telah mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk membangun kesadaran semua elemen masyarakat teradap pentingnya mengelola arsip.

Kepala ANRI Mustari Irawan dalam penjelasannya, menuturkan ada dua penyebab yang melatarbelakangi perlunya upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip. Pertama, kondisi faktual yang ada dalam masyarakat, bahwa arsip sampai sekarang masih dilihat sebelah mata, belum mempunyai peranan tidak hanya bagi organisasi tetapi juga dalam birokrasi

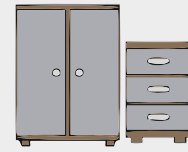
## LAPORAN UTAMA

pemerintahan. Hasil audit kearsipan yang dilakukan ANRI pada tahun 2016 lalu, memperlihatkan hanya ada 2 lembaga negara dan 2 pemerintahan daerah provinsi yang bernilai baik, selebihnya bernilai cukup dan buruk. Fakta tersebut menguatkan bahwa arsip masih dipandang sebelah mata oleh pimpinan lembaga negara dan pemerintah daerah provinsi sehingga penyelenggaraan kearsipannya kurang tertib. Kedua, pentingnya arsip belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Peranan yang belum dilihat ini menyebabkan seakan-akan arsip menjadi sebuah karya dunia yang dipinggirkan oleh masyarakat dan juga oleh organisasi. Penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, selama ini belum sepenuhnya memberikan andil dan berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih dalam paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun pemerintahan yang terbuka (*open government*), telah menempatkan transparansi dan akuntabilitas, sebagai salah satu prinsip dasar di dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan program untuk membangun kesadaran terhadap pentingnya mengelola arsip. ANRI selaku instansi pembina kearsipan dipandang perlu mempelopori suatu tindakan yang terencana dan masif dalam upaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola arsip dan tertib arsip kedalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Lebih jauh, Kepala ANRI menyampaikan bahwa GNSTA

### TERTIB PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN

- Tertib prasarana dan sarana meliputi penyediaan ruangan, peralatan dan gedung
- Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip aktif terdiri dari: ruangan sentral arsip aktif (*central file*) terdapat di setiap unit kerja eselon II/eselon III sesuai dengan beban volume arsip yang dikelola; dan *filing cabinet, folder, guide, map* gantung, *out indicator*, buku peminjaman arsip, komputer dan aplikasi pengelolaan arsip.
- Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip inaktif terdiri dari: penyediaan gedung sentral arsip inaktif (*record center*) untuk setiap lembaga negara; dan rak arsip/*roll o'pack*, boks arsip, folder, *out indicator*, buku peminjaman arsip, komputer dan aplikasi pengelolaan arsip inaktif



*Ayo Sukses*

**GERAKAN  
NASIONAL  
SADAR  
TERTIB A**

### TERTIB PENGELOLAAN ARSIP



- Tertib pengelolaan arsip di lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah meliputi: pembuatan daftar arsip dinamis, pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga, pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur, dan menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

### TERTIB PENDANAAN

- Tertib pendanaan meliputi p... anggaran dalam menunjang kebijakan kearsipan, tertib or... tertib sumber daya manusia... prasarana dan sarana dan t... berdasarkan prioritas tahun... negara dan penyelenggara pe...

bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat, tak terkecuali pemerintah melalui tiga pilar yang menjadi tujuan pembentukan GNSTA. Pertama, membangun kesadaran pentingnya mengelola arsip. Kedua, membangun penyelenggaraan tertib arsip. Ketiga

adalah menyelamatkan arsip di seluruh kementerian/lembaga. GNSTA sendiri telah mendapat dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang telah mencanangkan pada 17 Agustus 2016,

# Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip



program pengalokasian perwujudan tertib organisasi kearsipan, kearsipan, tertib tertib pengelolaan arsip pada lembaga pemerintahan daerah.

## TERTIB KEBIJAKAN KEARSIPAN



- Tertib kebijakan kearsipan meliputi kewajiban penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis oleh lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah meliputi:
  - tata naskah dinas;
  - klasifikasi arsip;
  - sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
  - jadwal retensi arsip.
- Pimpinan lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah harus menetapkan program arsip vital berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI
- Kebijakan pengelolaan arsip dinamis ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI

## TERTIB ORGANISASI KEARSIPAN



- Tertib organisasi kearsipan meliputi ketersediaan unit kearsipan dan sentral arsip aktif (central file) pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah

## TERTIB SDM KEARSIPAN



- Tertib sumber daya manusia kearsipan meliputi:
  - ketersediaan Arsiparis setiap eselon II paling sedikit 1 (satu) pada tiap lembaga negara; dan
  - ketersediaan Arsiparis setiap eselon III paling sedikit 1(satu) pada tiap penyelenggara pemerintahan daerah.\*

\*Mempertimbangkan analisis beban kerja

Informasi lebih lanjut mengenai Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dapat dilihat pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

Maret 2017 | Desain : Isanto

Infografis mengenai implementasi program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

bahkan di beberapa daerah sudah ditindaklanjuti dalam bentuk program dan aksi nyata, seperti yang dilakukan oleh Bapusipda Jawa Barat (sekarang menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah). ANRI selaku pencetus gagasan GNSTA juga telah memberi

payung hukum untuk kegiatan tersebut melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Tentunya, adanya Perka ini diharapkan memacu lembaga negara, pemerintah daerah,

serta masyarakat untuk melakukan aksi yang nyata dan masif sehingga terbangun kesadaran akan pentingnya arsip dan kesadaran untuk mengelola arsip, maupun kesadaran mewujudkan tertib arsip. Sasaran GNSTA ini adalah tertib dalam mematuhi kebijakan kearsipan, tertib dalam pemberdayaan kelembagaan kearsipan, tertib dalam pengelolaan arsip yang sistematis, tertib dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan, dan tertib dalam penyediaan Arsiparis yang didukung oleh kompetensi kearsipan.

Sekretaris Utama ANRI Sumrahadi menjelaskan esensi keberadaan GNSTA. "Adanya GNSTA merupakan aksi terhadap gambaran nyata yang terdapat di lingkungan masyarakat kita, termasuk dalam birokrasi pemerintahan, karena itu upaya membangun kesadaran arsip tentunya mempunyai nilai strategis, tidak hanya berhenti pada tertib arsipnya di lingkungan pencipta arsip saja, tetapi lebih dari itu karena secara konsep arsip yang bernilai sejarah yang dimiliki pencipta arsip merupakan jati diri bangsa, dengan arsip yang terkelola maka kita sesungguhnya sudah mengumpulkan bukti pertanggungjawaban nasional yang juga sebagai memori kolektif bangsa". Oleh karena itu, perlu ada semacam 'gerakan nasional' yang masif untuk menyadarkan masyarakat sehingga manfaat dari gerakan tersebut mampu dirasakan oleh semua pihak. Kata-kata 'wajib' dalam regulasi artinya penyelenggaraan kearsipan mau tidak mau harus ditaati, demikian menurut Sumrahadi.

Pendapat tersebut diamini oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik pada Kementerian

## LAPORAN UTAMA

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman. “Bahwa adanya GNSTA yang dipelopori ANRI ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dimana salah satu instrumen yang kita gunakan adalah akuntabilitas”, ungkap Suryatman. Lebih lanjut Suryatman menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang tertib melalui penyimpanan dan kemudahan akses informasi merupakan bukti akuntabilitas sekaligus bentuk pertanggungjawaban instansi/lembaga dalam penyelenggaraan negara. Adanya akuntabilitas sebagai area perubahan dalam penyelenggaraan negara diharapkan mewujudkan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang melayani dan berkualitas.

ANRI sendiri, menurut Sumrahyadi, selama ini telah melakukan pembinaan kearsipan secara kontinu karena sudah menjadi tugas pokoknya, baik itu pembinaan kepada kementerian/ lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta perguruan tinggi negeri.

“Jadi GNSTA ini sebenarnya bukan program baru melainkan kelanjutan dari pembinaan yang selama ini dilakukan ANRI hanya saja kali ini dilakukan secara masif, terencana dan terukur. Seperti sekarang ini, kita sedang gencar-gencarnya mendorong pencipta arsip pada lembaga negara dan pemerintah daerah untuk menyiapkan instrumen pendukung dalam pengelolaan arsip dinamis, karena tanpa ada instrumen tersebut mustahil dapat mewujudkan tertib arsip”, ujar Sumrahyadi.

Tercapai atau tidaknya tujuan



Kepala ANRI Mustari Irawan

**“Dalam konteks gerakan ini tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia kearsipan, yaitu pejabat struktural di bidang kearsipan pada level manajerial, Arsiparis dan pengelola arsip pada level pelaksana”**

GNSTA, menurut Kepala ANRI sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. “Dalam konteks gerakan ini tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia kearsipan, yaitu pejabat struktural di bidang kearsipan pada level manajerial, Arsiparis dan pengelola arsip pada level pelaksana. Pejabat struktural, selaku pimpinan

tinggi harus dibekali wawasan tentang pentingnya arsip sehingga mampu menghasilkan ‘policy’ ataupun kebijakan program kearsipan yang mendukung tertib arsip dan mampu menyelamatkan arsip”, tegasnya.

Mustari menambahkan bahwa Arsiparis dan pengelola arsip selaku pelaksana harus ditambah kompetensinya. Arsiparis sebagai SDM Kearsipan menjadi ‘kunci sekaligus katalisator untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan penyelenggaraan kearsipan nasional. Hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki oleh Arsiparis sangatlah spesifik, tidak hanya sekedar menjaga informasi saja, tetapi Arsiparis diharapkan mampu menciptakan dan membangun informasi yang cerdas dan bertanggung jawab sebagaimana esensi dari *Good Governance* dan *Open Government* Indonesia.

Menurut Mustari yang dikalangan pemerhati puisi dikenal dengan nama Irawan Sandhya Wiraatmaja, mengungkapkan bahwa khusus Arsiparis ini, secara kuantitas jumlahnya masih jauh dari kebutuhan yang ada, diperlukan strategi dan terobosan untuk mengatasi kebutuhan Arsiparis pada lembaga negara dan pemerintah daerah. Ada beberapa strategi yang kita upayakan dapat meminimalkan persoalan mengenai kebutuhan Arsiparis ini. Pertama, ANRI akan terus berusaha membuka Sekolah Tinggi Ilmu Kearsipan (STIKER) dalam bentuk politeknik ataupun pendidikan vokasi, disamping menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk membuka dan menyelenggarakan pendidikan vokasi kearsipan. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan tenaga Arsiparis





Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis (Dok. HM.ANRI)

melalui jalur formal. Kedua, dalam waktu dekat untuk mengisi kebutuhan Arsiparis di lembaga negara dan pemerintahan daerah akan dilakukan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui jalur penyesuaian/*inpassing*. sampai Desember 2018. Kebijakan *inpassing* ini menindaklanjuti keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Sementara untuk fungsional umum sesuai kebijakan pemerintah akan diarahkan menjadi jabatan pelaksana yang nantinya dibekali dengan keterampilan mengerjakan kegiatan kearsipan, demikian tutur Mustari yang telah menerbitkan 3 buku antologi-kumpulan puisi, masing-masing berjudul: 'Teror Diantara 2 Ideologi', 'Dan Kota-Kota Pun', serta 'Anggur, Apel dan Pisau Itu'.

Dalam penjelasannya, Kepala ANRI menyadari bahwa keberhasilan GNSTA sangat dipengaruhi oleh SDM Kearsipan, mulai dari pimpinan hingga keberadaan Arsiparis yang tersebar sebagai katalisator penyelenggaraan kearsipan. "Kita berharap para Kepala Lembaga Kearsipan yang berlatar belakang bukan dari kearsipan mampu beradaptasi cepat dengan segala kebijakan kearsipan yang berlaku", jelas Mustari. Baginya, titik awal dalam melakukan GNSTA ini harus melakukan 'pembenahan arsip-tertib arsip' dikalangan birokrasi dulu, baik itu di pusat dan daerah. Birokrasi sebagai subjek tata kelola dalam lingkungan pemerintahan harus menjadi pelopor sekaligus panutan bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis di Redtop

Hotel 7 Februari 2017 mempertegas pentingnya keberadaan arsiparis guna mensukseskan GNSTA.

"Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip merupakan upaya untuk membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip, khususnya yang terkait dengan birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah adalah ujung tombak pergerakan yang bisa diikuti masyarakat, karena itulah birokrasi harus mempunyai kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan kearsipan, dimana kesiapan sumber daya manusia kearsipan khususnya Arsiparis menjadi penggerak utama untuk suksesnya tertib arsip harus disiapkan secara sungguh-sungguh", Asman Abnur.

Artinya, SDM Kearsipan memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan tertib arsip melalui kompetensi kearsipan yang dimilikinya. Dengan demikian, uji kompetensi terhadap Arsiparis dan pejabat struktural di bidang kearsipan harus pula dilakukan secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kompetensi telah menjadi pintu masuk untuk menciptakan SDM Kearsipan yang berkualitas, yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan sumber daya lain untuk menyadarkan aparatur negara dan lembaganya akan betapa pentingnya arsip, betapa perlunya pengelolaan arsip yang tertib, dan betapa perlunya penyelamatan arsip melalui satu aksi yang masif, dimana saja, kapan saja, dan siapa saja untuk melakukan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. (BPW)

# MEMBANGUN NEGERI SADAR ARSIP

*“Sebuah negeri adalah pencerminan dari manusia yang menjadi warganya. Jika manusianya baik, maka baik pula negerinya dan jika manusianya buruk, maka buruk pula negerinya”. (Filsafat Politik Plato)*

**M**encermati serangkaian peristiwa yang terjadi di negeri ini mulai dari hilangnya Dokumen Tim Pencari Fakta atas kasus kematian seorang aktivis HAM, raibnya Supersemar, bocornya Surat Perintah Penyidikan KPK atas seorang politisi ternama, tentunya membuat kita sulit untuk percaya bahwa negeri ini adalah negeri yang sadar terhadap arsip. Padahal, sudah banyak program nasional yang diupayakan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap arsip. Mulai dari Program Arsip Masuk Desa, Layanan Mobil Masyarakat Sadar Arsip, sampai pada program-program sosialisasi melalui media massa dan pembinaan hampir seluruh pelosok negeri.

Membangun negeri sadar arsip bukanlah hal yang mudah. Tantangannya sungguh luar biasa. Arsip dalam sudut pandang manapun tidak akan menarik perhatian jika hanya dipandang sebagai produk samping

dari proses administrasi. Celakanya, pandangan seperti itu sudah berurat nadi dalam pemikiran masyarakat negeri ini. Tak heran jika masyarakat masih belum menyadari pentingnya arsip bagi kehidupan mereka.

## Manfaat Arsip Bagi Kehidupan Manusia

Sesuatu akan dianggap penting jika ia dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Untuk itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menonjolkan manfaat arsip di setiap sendi kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan pengakuan dari kelompok sosialnya. Untuk itu, setiap manusia wajib menunjukkan identitas dan jati dirinya guna dapat dikenali dan diterima oleh anggota masyarakat lainnya. Tidak terbayang jika suatu waktu ada orang asing yang datang dalam suatu kelompok sosial tertentu dan mengaku bahwa ia adalah bagian dari kelompok itu tanpa mampu menunjukkan bukti

identitas dan asal usulnya. Apakah orang asing tersebut dapat diterima dengan mudah di dalam kelompok masyarakat itu? Lain halnya jika ia mampu menunjukkan bukti seperti kartu keanggotaan, kartu identitas, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau akta lahir.

Manusia sebagai makhluk politik, memerlukan legitimasi kekuasaan atas kedudukan yang ia peroleh di tengah masyarakat. Dalam masyarakat demokrasi, legitimasi itu diperoleh melalui pemilihan yang dilakukan melalui serangkaian mekanisme pemungutan suara. Setiap suara direkam melalui surat suara dan formulir-formulir penghitungan suara. Tanpa adanya pengelolaan yang baik terhadap surat suara dan formulir-formulir tersebut maka jangan heran jika kemudian kekuasaan seseorang dipertanyakan legitimasinya.

Manusia sebagai makhluk ekonomi, selalu mempertimbangkan aspek untung rugi dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Coba kita bayangkan jika surat-surat berharga seperti surat deposito, surat utang

negara, dan surat saham, tidak disimpan dengan aman, apakah resiko terbesar yang dialami oleh pemiliknya? Coba kita bandingkan suatu aset tanah yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan aset tanah yang tidak memiliki sertifikat, apakah memiliki nilai jual yang sama?

Arsip itu sangat dekat dengan masyarakat, namun masyarakat tidak mengenalnya. Untuk itu, mereka yang selama ini menganggap remeh arsip, bukan karena mereka tidak peduli dengan arsip, melainkan lebih karena mereka belum mengenal arsip. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengenalkan arsip sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri.

#### **Bukan Sekedar Gerakan Massif**

Sesuatu yang bersifat serentak dan massal terkadang dianggap sebagai sesuatu yang lebih besar manfaatnya dan lebih mudah selesainya. Padahal ketika berbicara gerakan massif maka kita akan dihadapkan pada luasnya jangkauan, sementara ketika kita berbicara membangun kesadaran maka kita akan dihadapkan dengan kedalaman pemahaman. Untuk itu, dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap arsip yang lebih dibutuhkan adalah konsistensi dan kesinambungan program. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap arsip dibangun secara perlahan dan terus menerus sehingga tertanam dengan kuat dalam pemikiran dan cara hidup mereka.

Tanpa adanya konsistensi dan kesinambungan dalam mengimplementasikan suatu program hanya akan menjadikan kata membangun sebagai tindakan yang dimulai hari ini dan berakhir keesokan harinya. Padahal konsep membangun adalah orientasi tanpa akhir. Untuk itu kesadaran masyarakat terhadap arsip harus dikembangkan secara mandiri dan terlembagakan sehingga dengan atau tanpa intervensi pemerintah, kepedulian masyarakat terhadap arsip

“ Mereka yang selama ini menganggap remeh arsip, bukan karena mereka tidak peduli dengan arsip, melainkan lebih karena mereka belum mengenal arsip... ”

tetap berlanjut.

#### **Pemerintah Saja Tidak Cukup**

Selama ini program-program pembangunan lebih berorientasi dan berpusat pada pemerintah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada pengendalian dan evaluasi. Padahal pemangku kepentingan dalam proses pembangunan bukan hanya pemerintah. Tak heran jika kemudian program-program pembangunan kurang menyentuh para pemangku kepentingan lainnya.

Setidaknya ada tiga pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam proses pembangunan, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah akan sulit membangun negeri sadar arsip tanpa adanya kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Mengapa? Pertama, karena arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada tiga pelaku yang tecermin dari pengertian arsip tersebut, yakni pemerintah yang diwakili oleh lembaga negara, pemerintahan daerah dan lembaga pendidikan, kemudian perusahaan, serta masyarakat yang diwakili oleh organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Dengan demikian, kearsipan bukan

hanya milik pemerintah tetapi juga milik perusahaan dan masyarakat. Mereka juga memiliki kesempatan yang sama dalam partisipasi pembangunan di bidang kearsipan sejak tahap identifikasi masalah sampai pada menikmati hasilnya. Bukankah partisipasi merupakan muara dari upaya membangun negeri sadar arsip?

Kedua, keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun prasarana dan sarana. Hal ini merupakan masalah klasik bagi pemerintah. Jika tidak disiasati maka sampai kapanpun proses pembangunan hanya akan sebatas pada tersedianya sumber daya yang ada pada pemerintah. Padahal potensi sumber daya negeri ini tidak terbatas pada apa yang dimiliki oleh pemerintah. Kita dapat memberdayakan sektor lain yaitu swasta dan masyarakat. Dengan membentuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan, pihak swasta dan masyarakat pasti mau menyediakan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung upaya membangun negeri sadar arsip.

Ketiga, pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan, tetapi berubah menjadi pola hubungan yang lebih sejajar dan demokratis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hal ini mau tidak mau harus dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan di negeri ini. Dalam tataran ini, membangun negeri sadar arsip berarti membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. (KNF)



# SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

**S**inergi merupakan kata yang sering kali disebutkan, dalam beberapa hal yang sifatnya kerjasama kata sinergi memberi kekuatan bahwa kita tidak melaksanakan sendiri sebuah tujuan yang dicita-citakan ada kekuatan lain yang mendorong untuk bersama mewujudkannya. Dalam dunia kearsipan tujuan itu terbentang jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah. Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti konstruksi penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota merupakan

pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tindak lanjut amanat dari konstitusi negara Indonesia. Bahwa tujuan dari keberadaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diantaranya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.

Terdapat dimensi peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dari undang-undang Pemerintahan Daerah atau undang-undang kearsipan. Jika konsep otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, kali ini penulis mencoba memberikan sudut pandang lain bahwa pembagian kewenangan itu melahirkan sinergisme antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam upaya mewujudkan tertib arsip. Dengan tertib arsip pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Karena kesamaan tujuan dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah dengan tertib arsip, maka gerakan sadar tertib arsip hadir sebagai jawaban atas kesesuaian program pusat dan daerah dengan landasan bahwa gerakan tertib arsip harus mampu massif sampai ke unit pemerintahan daerah. Sia-sia jika gerakan itu hanya sebuah gerakan yang tidak ditindaklanjuti dengan aksi yang nyata terhadap pembenahan dan tertib kearsipan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kemudian urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kearsipan.

### **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kearsipan**

Urusan pemerintahan konkuren bidang kearsipan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan asas otonomi dilaksanakan sepenuhnya oleh Daerah dengan menggunakan sumber daya, cara, dan strategi yang ditentukan oleh daerah masing-masing. Oleh karena itu, ANRI mempunyai tanggung jawab untuk memastikan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Merujuk pada pentingnya arsip sebagai tulang punggung manajemen pengelolaan pemerintahan sekaligus arsip sangat berarti bagi pelaksanaan cita-cita Negara

Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ANRI diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah. Sinergi ini sangat dibutuhkan di dunia kearsipan sehingga pusat dan daerah mampu melaksanakan tujuan kearsipan bersama.

Setiap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah mengandung layanan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah, layanan tersebut merupakan penjabaran atas setiap kewenangan urusan pemerintahan konkuren berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau perangkat daerah lain. Pemenuhan layanan merupakan target kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren saat ini sedang dalam pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI yang sedianya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai delegasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Walaupun demikian, beberapa hal terkait dengan kebijakan ANRI terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, telah dilaksanakan melalui masukan terhadap penyusunan layanan utama bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota. Aspek ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan,

pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain menjadi dasar penyusunan layanan utama yang juga ditopang dengan gerakan nasional sadar tertib arsip yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala ANRI.

Pemerintah pusat, dalam hal ini ANRI memiliki tanggung jawab di bidang kearsipan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah terhadap keselarasan antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah; konsistensi antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan kebijakan rencana tahunannya; kesenjangan antara rencana pembangunan daerah dengan kinerja capaian; kesesuaian antara pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan ketentuan di dalam NSPK; ketersediaan dan kesesuaian personil, prasarana dan sarana, pembiayaan, serta sistem dokumentasi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta dukungan atau kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Pada akhirnya Rancangan Peraturan Pemerintah ini masih banyak proses masukan dan pembahasan yang tentu masih bisa berubah. Tetapi dalam matrik layanan utama urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi, Kabupaten/Kota bidang kearsipan telah diusulkan, tentunya kita berharap bahwa program gerakan nasional sadar tertib arsip disokong pula dengan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang kearsipan.

### **Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip**

Negara yang sejahtera adalah negara yang tertata arsipnya, catatan-

## ARTIKEL LAPORAN UTAMA

catatan perkembangan sebuah negara akan dapat tergambar pada arsip yang tercipta. Berangkat dari problem dimana arsip masih menjadi urusan yang paling akhir dari sekian urusan pemerintahan, maka dibentuklah gerakan untuk menjadikan arsip sebagai garda terdepan penyelenggaraan akuntabilitas pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kepala ANRI mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2017. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang selanjutnya disingkat GNSTA merupakan upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan.

Tujuan dari GNSTA antara lain mendorong lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan tertib: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan; b) pembentukan organisasi kearsipan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif; c) pengelolaan sumber daya manusia kearsipan secara optimal; d) pengelolaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan; e) pelaksanaan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu; f) penyediaan dan penggunaan dana kearsipan secara efektif dan efisien.

Sedangkan strategi utama GNSTA meliputi, pertama, menjadikan tertib arsip sebagai program prioritas pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah sebagai arus

| NO                 | PROGRAM   | PELAKSANA  |
|--------------------|---|--|
| <b>PERSIAPAN</b>   |   |  |
| 1.                 | Analisis Pemetaan Permasalahan pada (K/L/D).  | ANRI   |
| 2.                 | Sosialisasi:  | ANRI   |
|                    | a. Penyampaian Kebijakan GNSTA.   |  |
|                    | b. <i>Commitment Agreement</i> (K/L/D).   |  |
|                    | c. Pembentukan <i>Agent Of Change - Archivist Team Agent</i> pada (K/L/D).  |  |
| 3                  | Penyiapan prasarana dan sarana pendukung GNSTA  | Tim Nasional/ Tim Daerah                             |
| <b>PELAKSANAAN</b> |   |  |
| 3.                 | Workshop bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi percepatan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis. | ANRI   |
| 4.                 | Program perwujudan tertib SDM Kearsipan:  | Lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah |
|                    | a. <i>Inpassing</i> Arsiparis.  |  |
|                    | b. Rekrutmen Arsiparis.   |  |
|                    | c. Bimbingan teknis bagi Arsiparis.   |  |
| 6.                 | Supervisi   | Tim Nasional/ Tim Daerah                             |
| <b>EVALUASI</b>    |   |  |
| 7.                 | Monitoring dan Evaluasi   | Tim Nasional/ Tim Daerah                             |
| 8.                 | Festival dan Penghargaan GNSTA.   | ANRI   |

Rencana Aksi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan; Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah; Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah yang mendukung perilaku sadar tertib arsip.

Lalu apa saja sasaran GNSTA? sasaran meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam lampiran Peraturan Kepala

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip terdapat pula Program dan Rencana Aksi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Sebagai sebuah gerakan yang baru saja ditetapkan, tentu kita masih belum bisa berbicara tingkat keberhasilannya, tetapi semangat untuk menjadikan arsip sebagai prioritas dalam setiap lingkup pekerjaan patut dijadikan sebuah kekuatan untuk bersama mewujudkannya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kearsipan dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip merupakan dua potret kebijakan bidang kearsipan yang perlu mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Karena bagaimanapun sinergi merupakan kunci bagi keberhasilan tujuan kearsipan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (RD)

# TERTIB ARSIP PILKADA



Dok.HM.ANRI

**P**erhelatan politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 di 101 daerah di Indonesia sudah berlalu. Seratus daerah telah melaksanakan pilkada secara langsung dalam satu putaran, hanya satu daerah yang harus melakukannya dalam dua putaran, yaitu provinsi DKI Jakarta, karena tidak ada pasangan calon (paslon) yang meraih suara 50% plus satu suara. Dengan demikian, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI harus diselenggarakan pilkada putaran kedua yang diikuti paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Apresiasi harus kita sampaikan kepada rakyat yang telah memberikan

suaranya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemdagri, Polri, TNI, dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, sehingga secara umum pilkada serentak 2017 dapat diselenggarakan dengan sukses.

Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan pilkada yang sukses hanya sebatas pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara damai dan berkeadilan, tapi tidak mengaitkan dengan ketertiban terhadap arsipnya? Padahal, arsip pilkada merupakan informasi faktual penyelenggaraan pesta demokrasi lokal yang sangat penting sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan memori kolektif bangsa.

## **Perwujudan Good Governance**

Bagi KPU-Bawaslu penyelenggaraan pilkada harus dibaca sebagai suatu penyelenggaraan pesta demokrasi formal yang biayanya menggunakan sumber dana negara. Dengan demikian, arsip yang tercipta dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada (persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa) merupakan arsip negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.

Sebagai arsip negara, keberadaan arsip pilkada di lingkungan KPU-

Bawaslu harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat melalui ketertiban arsip pilkada. Yang dimaksud dengan ketertiban arsip pilkada adalah adanya ketaatan terhadap tata kelola arsip pilkada sebagai arsip negara oleh KPU-Bawaslu selaku penyelenggara pilkada (persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa) untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Cepatnya perwujudan *good governance* tidak bisa dilepaskan dari ketertiban arsip pilkada. Tertibnya arsip pilkada menunjukkan bahwa pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis, dengan memberikan perhatian terhadap hak rakyat untuk memperoleh arsip pilkada sebagai informasi publik.

Dengan demikian, pemerintah selalu mampu menyajikan informasi pilkada yang terpercaya berbasis arsip, sehingga rakyat terhindar dari sumber informasi bohong (*hoax*) dan memulihkan kepercayaan publik kepada institusi-institusi demokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah, karena selain mampu menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerahnya, juga menjamin hak rakyat untuk memperoleh arsip pilkada sebagai informasi publik dengan benar.

Arsip pilkada merupakan informasi faktual pesta demokrasi yang memiliki nilai pengetahuan dan kesejarahan tinggi untuk pengembangan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kesuksesan pilkada sejatinya tidak hanya diukur dari aspek ketertiban pemilihan kepala daerahnya, tetapi juga dari aspek ketertiban arsipnya.

### Pilkada Beradab

Hal yang patut disyukuri dari pilkada serentak (2015 dan 2017), adalah tidak terjadinya kekerasan

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga tercipta pilkada beradab. Masyarakat tidak disuguhkan kegaduhan, drama kekerasan, dan praktik defisit demokrasi yang memalukan. Ini sukses penting dari bangsa Indonesia untuk dunia bahwa kita mampu melaksanakan pesta demokrasi yang beradab.

Namun demikian, apakah ukuran pilkada beradab hanya sebatas pada hal tersebut? Berdasarkan data Pusat Pengkajian dan Pengembangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2016, masih banyak arsip pilkada periode 2004, 2009, dan 2014 belum terkelola dengan baik di daerah. Hal ini tentunya menjadi sinyal negatif bagi ketertiban arsip pilkada. Realitas penyelenggaraan pilkada akan beradab, apabila diikuti dengan tanggung jawab terhadap ketertiban arsipnya sebagai aset negara.

Sebagai bangsa yang beradab, kita harus melihat arsip pilkada bukan sekedar dokumen perhelatan pesta demokrasi yang tidak penting, sehingga tidak perlu dikelola secara profesional. Arsip pilkada adalah informasi faktual pesta demokrasi lokal sejaman. Ia merupakan aset negara yang sangat berharga untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Sir Arthur G. Doughty, (1924) mengatakan, "*Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya*".

Agar dapat tercipta pilkada beradab dalam perspektif tertib arsip, maka paling tidak ada lima hal yang perlu diperhatikan oleh KPU-Bawaslu selaku penyelenggara pilkada. Pertama, ketersediaan regulasi kearsipan dinamis (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi dan kemanan akses arsip). Regulasi kearsipan ini berfungsi

sebagai alat kontrol pengelolaan arsip pilkada. Kedua, pengelolaan arsip pilkada (penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan arsip) secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan regulasi kearsipan dinamis.

Ketiga, ketersediaan sumber daya pendukung kearsipan (unit kerja, SDM, prasarana dan sarana, anggaran) untuk mengelola arsip pilkada baik manual dan elektronik. Data Pusjibang, ANRI, 2016, menunjukkan pada umumnya KPU-Bawaslu (provinsi, kabupaten/kota) tidak memiliki SDM kearsipan (arsiparis) dan ruangan penyimpanan arsip pilkada masih mengandalkan ruangan dan peralatan apa adanya. Bahkan ada ruangan penyimpanan arsip disatukan dengan barang nonarsip, sehingga banyak arsip pilkada yang tercecer.

Keempat, lakukan pemusnahan arsip pilkada berdasarkan prosedur yang benar. Perhatikan dengan cermat terhadap usia simpan arsip, nilai guna arsip, dan rekomensasi persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI. Ketidakpatuhan terhadap hal ini merupakan perbuatan pidana, yang sanksinya berupa penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (Pasal 86 UU No. 43/2009 tentang Kearsipan). Kelima, secepat mungkin menyerahkan arsip pilkada bernilai kesejarahan (arsip statis) yang telah selesai masa simpannya berdasarkan JRA kepada lembaga kearsipan daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai pengelola arsip statis pilkada di daerah.

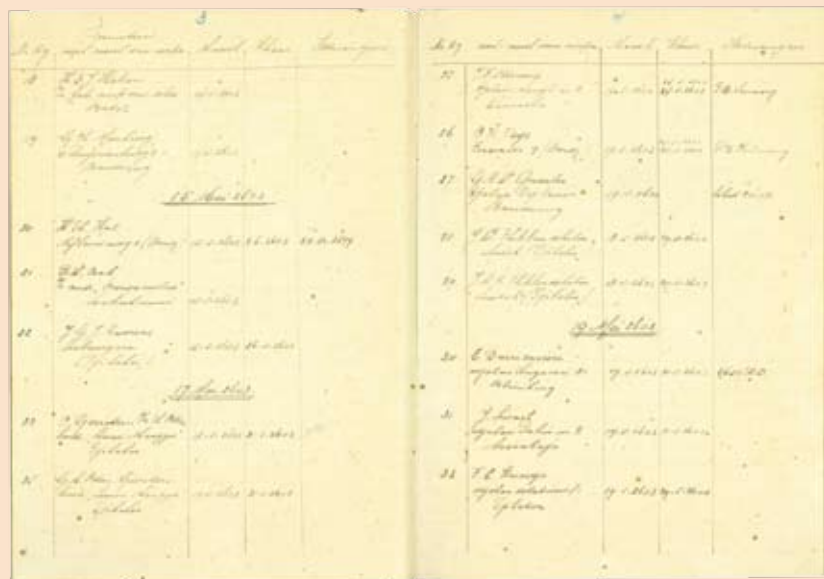
Setidaknya, pilkada merupakan ujian bagi praktik penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh karena itu, ketika kita berikrar diri sebagai bangsa yang beradab dan menjadikan pilkada beradab sebagai wajah pesta demokrasi kita, maka pada saat yang sama kita tidak boleh lagi memungungi dan mengabaikan ketertiban arsip pilkada. (AZ)



# MENELUSURI DOKUMEN GENEALOGI DI DALAM ARSIP LANDSARCHIEF

Setiap kita pasti memiliki dan menghasilkan arsip. Arsip yang kita miliki pastinya bermakna penting bagi kita. Ada pun arsip personal yang kita miliki beberapa diantaranya adalah akte kelahiran, ijazah sekolah, foto-foto bersama keluarga maupun yang mungkin juga adalah arsip video keluarga yang sengaja kita rekam untuk menjadi kenangan yang dapat dilihat kembali di kemudian hari. Namun, yang terpenting dari semuanya adalah arsip silsilah keluarga kita yang disebut dengan genealogi.

Genealogi merupakan studi yang melingkupi nenek moyang dan garis keturunannya. Dengan kata lain, studi genealogi menitikberatkan kepada pencarian jejak asal usul seseorang melalui garis darah. Dengan melakukan penelitian genealogi berarti seseorang akan dapat mengetahui garis keturunannya dengan nenek moyangnya dan saudara-saudaranya yang memiliki garis keturunan yang sama. Beberapa dokumen yang terkait dengan genealogi adalah akte kelahiran dan akte kematian, data imigrasi, akte pembaptisan, surat sertifikat pemakaman dan lain sebagainya. Genealogi memiliki peran yang sangat penting di dalam sejarah, sebagai contohnya bagi seseorang yang berasal dari keluarga kerajaan, genealogi sangat berguna untuk melihat garis darah calon raja atau ratu. Walaupun bagi orang biasa genealogi tidak sama penting seperti keluarga kerajaan. Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, dokumen genealogi sangat berguna dan sangat penting karena dapat menyelamatkan nyawa seseorang.



Buku permintaan berkas Assal Oesoel  
Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Landsarchief No. 250

Sertifikat atau dokumen genealogi dapat dikeluarkan dengan mudah. Adapun institusi maupun perorangan yang dapat menerbitkan dokumen semacam ini adalah pemerintah atau entitas legal seperti rumah sakit (untuk keterangan kelahiran atau keterangan kematian). Dikarenakan tidak sembarang pihak yang dapat mengeluarkan dokumen tersebut maka dokumen semacam itu sangat terpercaya dan dalam banyak kasus kebenarannya tidak diragukan lagi.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sudah ada orang-orang yang melakukan penelitian genealogi untuk mengetahui garis keturunan mereka. Orang-orang tersebut kebanyakan merupakan orang yang memiliki darah campuran atau biasa disebut dengan orang Indo terutama mereka yang berdarah Indo-Belanda. Pada masa tersebut,

orang-orang keturunan atau Indo memiliki kehidupan yang hampir sama dengan masyarakat pribumi. Dalam kasta sosial di masyarakat mereka berada di bagian paling bawah yaitu sama dengan masyarakat pribumi sedangkan orang Belanda asli atau Belanda totok memiliki kasta sosial paling tinggi. Tidak jarang para Belanda totok pun memiliki posisi yang tinggi di pemerintahan. Mereka yang bekerja di pemerintahan kebanyakan adalah orang Belanda murni. Sedangkan mereka yang berdarah Indo hanya bisa bekerja sesuai dengan kemampuan mereka karena tingkat pendidikan yang mereka raih pun tidak sama dengan mereka yang berdarah murni. Dikarenakan sangat layaknya kehidupan orang Belanda totok, banyak orang Indo-Belanda yang berupaya melakukan penelitian genealogi guna membuktikan bahwa

mereka keturunan Belanda. Dengan demikian, mereka berharap dapat memiliki kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik dan lain sebagainya yang dapat diraih dengan menjadi keturunan Belanda sesuai dengan status legal mereka.

Namun, hal ini berubah sangat drastis pada masa pendudukan Jepang. Segera setelah pertempuran di Laut Jawa yaitu dimulai pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Jawa. Di pulau Jawa, pertempuran berhenti pada tanggal 8 Maret 1942, di hari yang sama Rangoon atau sekarang disebut Yangon jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 4 Maret 1942, Batavia dievakuasi oleh tentara Belanda dan keesokan harinya, 5 Maret 1942, Batavia diduduki oleh tentara Jepang yang tentunya hal ini mengubah kehidupan di Hindia Belanda.

Sejak saat itu, Hindia Belanda berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Beberapa perubahan diambil selama masa tersebut dan salah satunya adalah menggantikan posisi para pejabat Belanda dengan orang Jepang maupun Indonesia yang mereka dapat percayai. Namun, pergantian ini tidak dilakukan secara serta merta melainkan bertahap karena bagaimana pun pada saat itu tidak banyak orang Jepang yang tinggal di Hindia Belanda. Sehingga mereka tetap membiarkan sejumlah orang Eropa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing pada posisi yang tidak dikuasai oleh orang Jepang pada saat itu.

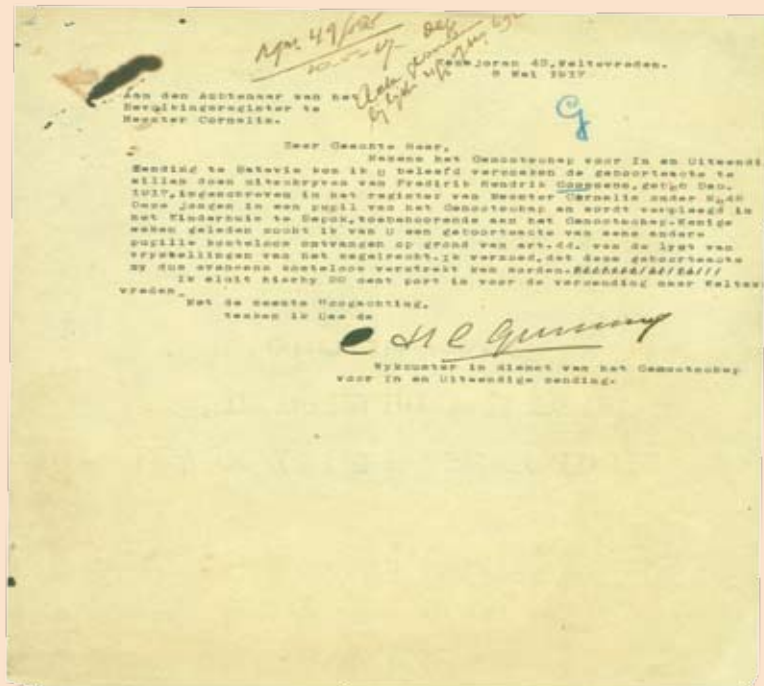
Saat tentara Jepang menduduki Hindia Belanda, dan sebagian besar Asia yang lain, mereka berencana untuk membangun sebuah 'kerajaan', sebuah kerajaan Asia untuk orang Asia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan rencana mereka, mereka mulai mengkategorikan penduduk berdasarkan ras dan mereka juga mulai menempatkan orang-orang ke dalam *internment camp* di daerah-daerah yang berada di dalam

kekuasaan mereka. Hal itu mereka lakukan guna 'membersihkan' orang non Asia dari masyarakat. Tentara Jepang mengalokasikan penduduk berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Negara-negara asal penduduk yang dialokasikan merupakan orang-orang yang berasal dari Negara yang dianggap sebagai musuh dari negara Jepang yaitu Belanda, Amerika Serikat, Inggris dengan Dominion Australiannya, Selandia Baru, Kanada, dan Afrika Selatan. Pada saat yang sama, mereka juga mencoba membujuk orang-orang Asia yang tinggal di Negara yang mereka kuasai untuk bekerja sama guna mewujudkan rencana mereka.

Orang-orang yang berdarah campuran meliputi Indo-Belanda dan/ atau orang Eurasia. Selama masa pendudukan Jepang, tentara Jepang mengalami kesulitan menempatkan mereka ke dalam masyarakat dikarenakan darah campuran mereka. Bagaimana pun, dengan pertimbangan bahwa sebelum kedatangan tentara

Jepang, orang Indo juga mengalami diskriminasi oleh orang Eropa totok dan juga oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, oleh karena itu, tentara Jepang mencoba memperlakukan mereka lebih baik dan menempatkan mereka ke dalam posisi yang lebih tinggi ketimbang orang Eropa totok di dalam masyarakat. Namun demikian, mereka tetap diawasi secara ketat. Sementara itu, rezim Jepang juga berencana untuk mengkategorisasikan keturunan berdarah campuran ke dalam satu komunitas (komunitas berdarah campuran/Indo) di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan rencana ini, penggunaan dokumen genealogi sangat diperlukan. Hal ini karena tentara Jepang memerlukan dokumen untuk memisahkan orang Indo dengan orang totok Eropa.

Dalam rencana tentara Jepang untuk mengelompokkan penduduk Hindia Belanda ke dalam berbagai kelompok ras dilakukan registrasi penduduk di berbagai tempat di Hindia Belanda. Dikarenakan ketakutan



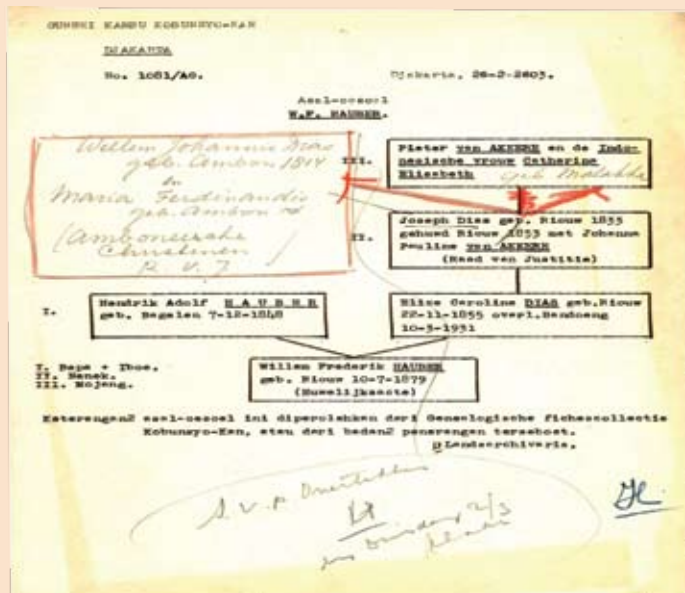
Surat permohonan dari biarawati kepada petugas Catatan Sipil (Bevolkingsregister) di Meester Cornelis untuk membuat akte kelahiran atas nama Frederik Hendrik Goossens.

Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Landsarchief No. 234

akan ditempatkan di *internement camp* yang konon serba terbatas dan serba kekurangan serta belum lagi sanitasi yang buruk dan hukuman yang menewaskan banyak orang, membuat banyak orang melakukan pencarian dokumen genealogi untuk membuktikan bahwa mereka memiliki darah Indonesia. Para penduduk mendatangi berbagai tempat seperti kantor Catatan Sipil, Gereja, Rumah Sakit serta kantor Arsip atau Landsarchief, dan lain sebagainya.

Landsarchief merupakan sebuah institusi pemerintah yang memiliki tugas untuk menyimpan dan melakukan preservasi terhadap arsip. Sebagai sebuah lembaga ilmu pengetahuan, Landsarchief di Hindia Belanda memiliki peranan khusus seperti: a) Melakukan preservasi, menata dan membuat deskripsi arsip-arsip atau dokumen yang disimpan di Landsarchief sesuai dengan peraturan prosedur ilmu pengetahuan; b) Melakukan formasi dan pengembangan kearsipan di Hindia Belanda; c) Berperan dalam manajemen sejarah baru Hindia Belanda; dan d) Menyediakan informasi kesejarahan.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan *Landsarchief* pada tanggal 28 Januari 1892 yang pada tanggal yang sama menunjuk Landsarchivaris atau yang sekarang dikenal sebagai arsiparis sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen di Landsarchief. Selama periode 1892 hingga 1942, terdapat empat orang yang secara berturut-turut menjabat sebagai *Landsarchivaris*. *Landsarchivaris* pertama adalah Jacob Anne van der Chijs yang menjabat dari tahun 1892 hingga 1905. Pada tahun 1905-1922, posisi sebagai *Landsarchivaris* dijabat oleh Dr. F. de Haan. Setelah Dr. F. de Haan, posisi tersebut diisi oleh E.C. Godée Molsbergen dari tahun 1922 hingga 1937. Dan orang terakhir atau keempat yang menjabat sebagai *Landsarchivaris* adalah F.R.J. Verhoeven. F.R.J. Verhoeven menjabat sebagai *Landsarchivaris* dari



Berkas Asal Oesoel dengan inisial nama keluarga H.  
Sumber: ANRI, Khazanah Arsip *Landsarchief*, nomor 256

tahun 1937 hingga 1943.

Landsarchief menyediakan layanan informasi terkait sejarah dan genealogi. Genealogi fische adalah salah satu koleksi berharga yang dimiliki oleh Landsarchief. Koleksi tersebut ada berkat ketekunan dari asisten Landsarchivaris yang bernama P.C. Bloys van Treslong Prins yang bertugas sejak tahun 1925 hingga 1937. Hingga akhir masa jabatannya dia berhasil mengumpulkan sekitar 400.000 kartu genealogi yang akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu data bagi Landsarchief untuk mengeluarkan dokumen genealogi yang bernama Assal Oesoel atau dalam ejaan saat ini Asal Usul yang banyak diminta oleh orang-orang Indo-Belanda. Banyaknya permintaan untuk dikeluarkannya dokumen Assal Oesoel membuat peran Landsarchief menjadi sangat penting dan sangat nyata terutama bagi masyarakat umum.

Assal Oesoel merupakan dokumen genealogi yang berisi garis keturunan seseorang. Dengan Assal Oesoel seseorang dapat melihat nenek moyangnya dan dengan menggunakan dokumen ini tentara Jepang dapat memutuskan apakah seseorang dapat

dimasukkan ke dalam *internment camp* atau tidak. Apabila seseorang (Indo) dapat menunjukkan bahwa dia memiliki darah Indonesia yang kuat maka hal itu dapat meminimalisir kemungkinan dialokasikan ke dalam *internment camp* dan dengan demikian, mereka dapat melanjutkan hidup di luar kamp. Dalam beberapa kasus, dokumen ini dapat menyelamatkan seseorang karena banyak penghuni kamp yang tidak dapat bertahan dengan kehidupan di dalam kamp. Hal ini diantaranya dikarenakan sanitasi yang buruk dan juga gaya hidup para penghuni kamp termasuk buruknya perlakuan para tentara Jepang kepada para penghuni kamp.

Dokumen Assal Oesoel ini dapat ditemukan di dalam inventaris arsip Landsarchief yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengolahan pada tahun 2014. Selain dokumen genealogi di dalam arsip Landsarchief juga terdapat arsip-arsip yang terkait dengan kegiatan Landsarchief sebagai lembaga kearsipan termasuk juga struktur lembaga ini yang berubah dari masa ke masa. (IL)

## BOEDI MARTONO : PENULIS BUKU-BUKU KEARSIPAN

*Para mahasiswa kearsipan maupun arsiparis era 90-an mungkin tak asing lagi dengan nama Boedi Martono, selain bekerja dia ANRI dan dosen kearsipan buku karya beliau telah menjadi referensi wajib mahasiswa Diploma Kearsipan selama bertahun-tahun. Tim redaksi ARSIP berkesempatan menyambangi kediaman beliau yang asri di bilangan Pondok Gede. Beliau tinggal bersama istrinya Sustiwi sedangkan anaknya Dian mengikuti suami yang bertugas sebagai Atase Pertahanan di Jepang, sedangkan anak lelakinya Aditya tinggal di sekitaran Bekasi. Berikut petikan wawancara tim redaksi dengan Boedi Martono:*

### SEKILAS BOEDI MARTONO

Boedi Martono dilahirkan di Purwokerto pada awal pendudukan Jepang 27 Desember 1942, dari ayah Boedi Soeharto dan ibu Marsiyah. Saat terjadi clash I, ia bersama keluarga berjalan kaki mengungsi dari Purwokerto ke Solo. Di kota Solo Boedi menempuh pendidikannya dari SD sampai SMA. Di SMA Negeri 2 Margoyudan ia seangkatan dengan

pakar militer Salim Said dan mantan Panglima Laksamana Widodo AS, namun beda jurusan. Laksamana Widodo di jurusan ilmu pasti (SMA-B) dan Boedi di jurusan Sastra dan Budaya (SMA-A). Bahkan keduanya satu tim dalam kesebelasan SMA Margoyudan Solo. Saat di SMA, Boedi sempat menjadi kiper Persis Solo.. Ia sering bertanding melawan kesebelasan dari kota lain. Namun, di antara pertandingan tersebut yang paling berkesan adalah saat melawan Persema Malang, walaupun kalah 4-0, tetapi saat *corner kick* bola melengkung melesat masuk ke pojok kiri gawang tanpa dapat dijangkau. Malu bercampur kagum atas kemampuan pemain lawan dengan tendangan pisangnya. Hingga kini Boedi masih ingat nama pemain tsb yakni Hasan yang juga pemain PSSI. Namun cedera lutut menghentikan karirnya di sepakbola

Setelah lulus ia kemudian melanjutkan kuliah di UGM jurusan sejarah, karena ia sebelumnya memang suka sejarah terutama dari buku-buku yang

dibacanya dan yang paling penting adalah peran Guru Sejarahnya di SMA yang mengajarnya sangat menarik dan atraktif, yaitu Pak Sunarto atau biasa dipanggil Pak Nero (terinspirasi dari Kaisar Nero). Hingga akhirnya lulus Sarjana Muda. Walaupun seharusnya bisa melanjutkan tingkat doctoral, namun mengingat kondisi ayah yang baru pensiun, Boedi akhirnya pindah ke ibukota untuk mencari pekerjaan. Atas arahan saudaranya, Boedi akhirnya kuliah kembali di Jurusan Sejarah UI. Selain kuliah Ia juga bekerja di Sekretariat Bersama Golongan Karya DPR-GR antara tahun 1969-1970. Sampai akhirnya dosen di kampusnya, ibu Soemartini menawarkan untuk bekerja di Arsip Negara/ ANRI sekarang. Saat itu Ibu Soemartini masih sebagai pejabat sementara kepala Arsip Negara menggantikan Bapak Mohammad Ali. Setelah lama memutuskan penawaran dan baru sekitar Oktober 1970 menerimanya. Pada bulan Desember tahun itu juga, Boedi Martono melepas masa lajangnya dengan menikahi Sustiwi.

### BERKECIMPUNG DALAM DUNIA KEARSIPAN

Setelah masuk ANRI, Boedi mendapat tugas untuk mendeskripsikan arsip 1945-1950 (Periode Republik). Selama ini ia hanya tahu arsip sebagai sumber sejarah. Baru beberapa bulan, tepatnya Januari 1971, Boedi Martono bersama dua staf lainnya yaitu Muchtar dan Bambang Hening Cipto (keduanya sudah almarhum sekarang) dikirim ke Malaysia untuk mempelajari kearsipan selama 3 bulan. Saat itu ia mendapat tugas untuk mempelajari Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Statis.

Pulang dari Malaysia, ia dipercaya oleh Ibu Soemartini untuk masuk dalam Tim Kearsipan kerjasama ANRI-LAN yang dihadiri oleh pejabat Biro Umum dan Biro Organisasi dan Tatalaksana. Hasil dari seminar tersebut adalah agar ANRI mengeluarkan Buku



Pedoman Sistem Kearsipan Dinamis. Untuk pembuatan buku tersebut ANRI kembali menggandeng LAN, dengan anggota tim mayoritas dari LAN (karena banyak ahli administrasi di sana) antara lain Suryono SH, MPA, FX Sudjadi MPA, Dipo Bharoto MA. Juga Drs. A. Hadi Abubakar yang saat itu sebagai pejabat di Sekretariat Negara. Beberapa waktu kemudian ybs ditarik menjadi pejabat di ANRI. Sedangkan dari ANRI adalah Dra. Soemartini sebagai ketua team dan Julianti Parani serta Boedi Martono. Bu Julianti kemudian mengundurkan diri dari tim.

Pengetahuan tentang Kearsipan Dinamis diperoleh Boedi karena sering diajak Ibu Soemartini mendengarkan ceramah-ceramah kearsipan di berbagai instansi. (Ia sempat berfikir, mungkin inilah cara Ibu Soemartini mengenalkan dunia arsip dinamis). Selebihnya saat job training di Malaysia terutama tentang sub sistem penyusutan arsip dan semakin berkembang saat menjadi anggota tim kearsipan. Di sinilah prinsip learning by doing berlaku baginya seraya menambah pengetahuan melalui literatur. Pengetahuannya semakin berkembang lagi setelah mengikuti training di luar negeri, di antaranya di Negeri Belanda dan Oxford, Inggris. Akhirnya setelah dua tahun berjalan, Tim tersebut melahirkan Sistem Kearsipan Pola Baru, Sistem tersebut disosialisasikan melalui seminar dan diklat selama 2 minggu. Pada tahun 1977, sistem ini mendapat respon yang cukup baik, dari Pemda maupun instansi pusat seperti BI, Taspen, Departemen PUTL, Departemen Dalam Negeri dan lain-lain.

### DUNIA TULIS MENULIS

Tulis menulis merupakan salah satu hobi beliau. Selain hobi dan keinginan untuk memperkenalkan khususnya dunia kearsipan pada khalayak bahwa arsip itu penting selain itu karena dapat tambahan uang saku. Banyak tulisan itu muncul setelah pulang seminar, maupun kegiatan lain. Biasanya supaya lebih fresh, Boedi Martono langsung menuliskannya, seperti setelah seminar tentang masalah kearsipan kerjasama ANRI-LAN. Pulang dari seminar terbitlah artikel dengan judul "Keadaan Kearsipan



Buku-buku kearsipan yang ditulis oleh Boedi Martono

*Indoensia Kacau Balau*" yang dimuat dalam Harian Kompas, 8 Oktober 1971.

Bahkan tidak hanya kearsipan, seperti waktu di Pelatihan di Malaysia, Boedi menulis tentang Wayang di majalah Masyarakat terbitan Malaysia, kemudian setelah pulang dari Malaysia karena pelatihannya tentang pemeliharaan dan perawatan arsip statis. Ia akhirnya menuliskannya dalam Bulletin Kearsipan edisi pertama terbitan tahun 1972.

Selain di majalah ARSIP saat itu, lahir pula artikel-artikel tentang perawatan arsip antara lain Bagaimana Mengatasi Buku-buku yang Terendam Air (Kompas, 11 Januari 1972) dan Beberapa Jenis Musuh Kertas (Kompas 25 Februari 1972). Berkas artikel-artikelnya tersebut, ia dipanggil Menteri Luar Negeri saat itu Bapak Adam Malik untuk merawat koleksi buku pribadinya. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena ANRI kekurangan SDM untuk membantunya.

Menulis juga tak terlepas dari resiko, seperti yang pernah ia alami saat menulis artikel berjudul Perkembangan Kearsipan Dewasa Ini yang dimuat Kompas Maret 1977. Ia sempat ditegur pimpinan karena di dalam artikel terdapat keterangan yang seharusnya bukan untuk konsumsi

publik. Namun ia tak patah semangat untuk tetap menulis. Sampai saat ini ia pun masih menulis, dari tema kearsipan, sejarah bahkan sepakbola dan puluhan judul artikel, yang dimuat di berbagai harian seperti Kompas, Suara Pembaruan hingga majalah Intisari.

Untuk lebih memasyarakatkan arsip utamanya arsip dinamis Tidak hanya artikel, ia juga merambah ke dunia perbukuan. Walaupun sempat ditolak awalnya oleh penerbit mainstream, akhirnya buku-bukunya berhasil diterbitkan oleh penerbit lain, yaitu Sinar Harapan, bahkan menjadi buku referensi untuk kuliah di diploma kearsipan. Buku yang pernah ditulis antara lain Sistem Kearsipan Praktis (1990), Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan (1992), Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam Manajemen Kearsipan (1994), dan Arsip Korespondensi (1997).

Dalam penutup wawancara ia juga berpesan kepada para arsiparis supaya jangan mudah puas terhadap ilmu yang dimiliki, harus terus dikembangkan sesuai zaman. Jangan bertanya apa yang diberikan kantor, tetapi apa yang dapat kalian berikan kepada kantor. (agg/dul)

# E-DEPOT ANRI

## Solusi Preservasi dan Akses Arsip Statis di Era Digital

*Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini memberikan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, tak terkecuali pada penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan. Sejak munculnya arsip elektronik dan konsepsi preservasi digital, lembaga kearsipan seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mau tidak mau harus mengubah strategi yang menjamin kelestarian dan peningkatan akses universal terhadap arsip statis bentuk digital demi kepentingan generasi yang akan datang. Upaya ini salah satunya diwujudkan melalui pembangunan e-Depot.*

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan *e-Government* mencakup seluruh area pemerintahan, termasuk bidang kearsipan. Dengan demikian, penyelenggaraan kearsipan di Indonesia harus mengakomodir perkembangan TIK. Selain itu, pemerintah juga menekankan pada penerapan *Open Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu area penerapan *Open Government* pada bidang kearsipan

yang menitikberatkan pada peningkatan transparansi terhadap informasi melalui penyediaan akses yang seluas-luasnya terhadap arsip dalam bentuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga kearsipan di tingkat pusat yang melaksanakan pengelolaan arsip statis bernilai guna nasional. Oleh sebab itu, ANRI harus dapat menjamin kelestarian dan menciptakan akses universal terhadap arsip statis yang dikelolanya termasuk yang berbentuk digital dengan memanfaatkan perkembangan TIK. Hal ini seiring dengan Program Reformasi Birokrasi yang menekankan pada peningkatan pelayanan publik di bidang kearsipan yang sesuai dengan

harapan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penerapan *e-Government* dalam bidang kearsipan dituangkan dalam program e-Arsip yang merupakan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi informasi. Program E-Arsip diselenggarakan oleh ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional. Salah satu wujud kegiatan E-Arsip adalah pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS). Arsip digital yang dikelola oleh ANRI dalam rangka pengelolaan arsip statis terdiri dari arsip elektronik dan arsip hasil digitalisasi.

Proses pengelolaan arsip statis bentuk digital di ANRI masih mengalami berbagai kendala yang antara lain: pertama, prasarana dan sarana untuk penyimpanan arsip statis bentuk digital yang belum memadai. Kedua, aksesibilitas dan pelayanan arsip statis bentuk digital bentuk masih sangat rendah. Ketiga, belum adanya perencanaan dalam pengelolaan arsip

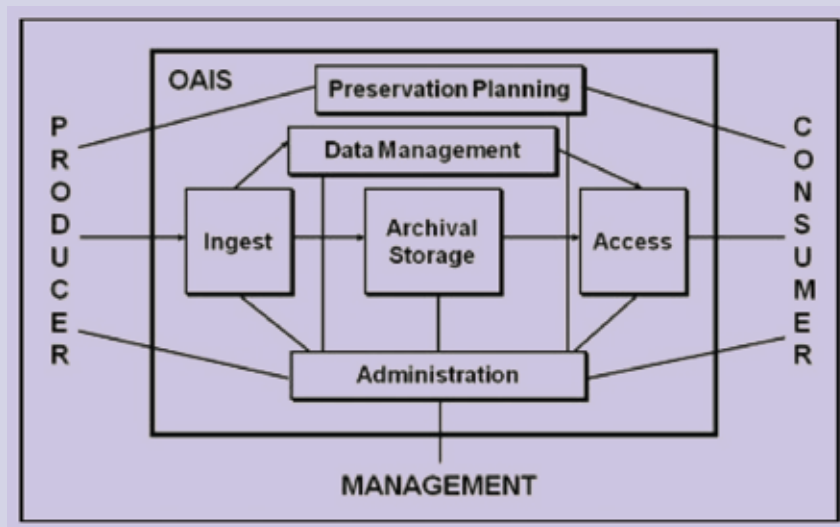
statis bentuk digital yang berbasis TIK secara komprehensif dan terpadu, sehingga mekanisme yang ada masih bersifat sektoral, akibatnya informasi yang tersedia masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi secara utuh.

Bertolak dari permasalahan di atas, ANRI pada tahun 2017 melalui Deputi Bidang Konservasi Arsip menyelenggarakan kegiatan pembangunan Depot Elektronik (e-Depot) dengan tujuan melakukan preservasi dan meningkatkan akses arsip digital yang menjadi khazanah ANRI. Pada dasarnya konsep e-Depot bukanlah hal yang baru, termasuk di dunia kearsipan di Indonesia. Namun, dalam satu dekade terakhir, belum ada satupun e-Depot yang berhasil dibangun oleh lembaga kearsipan di Indonesia dalam rangka preservasi dan akses arsip digital.

Pembangunan e-Depot ANRI juga selaras dengan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai koordinator penyelenggara kebijakan penerapan *e-Government*. Selain itu, ANRI juga membuka peluang untuk bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang rencananya akan melakukan pembangunan infrastruktur *National Data Center* dengan teknologi *cloud computing*.

### Definisi e-Depot

Pengertian e-Depot, sebagaimana didefinisikan oleh laman Arsip Nasional Belanda (*Nationaal Archief*), adalah kombinasi dari peralatan (*hardware*), pemrograman (*software*), dan prosedur (*procedure*) yang penting bagi sebuah lembaga kearsipan dalam mengelola arsip digitalnya dan membuat informasinya dapat diakses. Pembangunan e-Depot dilakukan agar informasi digital dapat dilestarikan dan dikelola dengan baik. Namun, adanya



OAIS Functional Model

kemajuan TIK membuat hal ini menjadi sulit. Oleh sebab itu, preservasi dan pengelolaan untuk khazanah arsip digital melalui e-Depot sangat berarti, seperti contohnya file yang ada di komputer sebaiknya dikonversi ke format yang lebih baik, format yang bertahan lebih lama. Selain itu, aspek aksesibilitas menjadi faktor determinan dimana arsip digital sudah semestinya dapat diakses publik via internet. Di sisi lain, pembangunan e-Depot akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan arsip statis secara signifikan.

### Pengadopsian Model OAIS

Pembangunan e-Depot ANRI dilakukan dengan mengutamakan kaidah kearsipan yang bersifat nasional dan internasional. Salah satunya adalah dengan menerapkan model *Open Archival Information System* (OAIS). OAIS model pertama kali dikembangkan oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) milik Amerika Serikat untuk kepentingan pengelolaan data terkait astronomi. OAIS yang mengandung kata *open* dan *archival system* di dalamnya, bila didefinisikan per kata menjadi seperti: *open* karena modul ini dapat dikembangkan di forum

publik, dan terbuka bagi publik yang tertarik dengan modul ini. *An archival information system* berarti bertanggung jawab untuk melestarikan informasi dan membuatnya dapat diakses publik. Definisi ini menekankan dua fungsi utama untuk *repository* OAIS model, yaitu pertama untuk melestarikan informasi, contohnya mengamankan keberadaan informasi tersebut dalam jangka waktu yang panjang, dan kedua, untuk menyediakan akses ke informasi arsip, yang sejalan dengan pengguna arsip.

Fungsi-fungsi yang terdapat pada Model OAIS secara singkat antara lain, pertama, *Ingest* yakni suatu proses penerimaan informasi yang diserahkan oleh pencipta arsip dan juga proses persiapan ke depot penyimpanan arsip digital secara permanen.

Kedua, *Archival Storage* adalah bagian dari sebuah sistem kearsipan yang mengelola penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang dan melestarikan khazanah arsip digital. *Archival Storage* (AS) juga bertanggung jawab terhadap migrasi format AS juga mengimplementasikan mekanisme pengamanan yang beragam, seperti prosedur pengecekan kerusakan (*error*), mengevaluasi proses hasil preservasi, termasuk dalam hal

## PRESERVASI

mitigasi bencana.

Ketiga, *Data Management* berfungsi merawat pangkalan data dari metadata deskriptif yang sudah teridentifikasi dan mendeskripsi informasi arsip dalam mendukung sarana bantu penemuan kembali arsip. Keempat, *Preservation Planing* berfungsi ini memetakan strategi preservasi dalam modul OAIS termasuk merekomendasikan perbaikan dan pengembangan yang dibutuhkan.

Kelima, *Access* merupakan fungsi untuk mengelola proses dan layanan yang pengguna arsip memanfaatkan arsip yang tersedia di penyimpanan arsip. Keenam, *Administration* merupakan fungsi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sehari-hari dari OAIS, dan juga mengkoordinasikan aktivitas di lima entitas fungsional OAIS lainnya.

### Kategori Arsip Digital pada e-Depot ANRI

Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik. Dalam dunia kearsipan internasional,

arsip ini dikenal dengan istilah *Born-Digital Records*. Keberadaan arsip elektronik sering menjadi permasalahan bagi lembaga pencipta arsip (*creating agencies*). Salah satu contoh yang sangat signifikan adalah permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran di Indonesia. Dewasa ini, hampir seluruh format arsip penyiaran di Indonesia tercipta dalam bentuk digital. Karena formatnya yang bersifat audiovisual, arsip tersebut memiliki ukuran yang luar biasa besar. Hal ini menimbulkan masalah bagi lembaga penyiaran karena kapasitas penyimpanan yang mereka miliki sangatlah terbatas. Kebanyakan setelah satu tahun disimpan di fasilitas mereka, arsip tersebut akan dihapus untuk dapat menampung arsip yang baru. Fenomena ini dapat menyebabkan bangsa ini kehilangan memori penting yang seharusnya dapat menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.

Sedangkan arsip hasil digitalisasi adalah arsip elektronik yang tercipta dari hasil alih media dalam rangka pelestarian informasi dari arsip yang

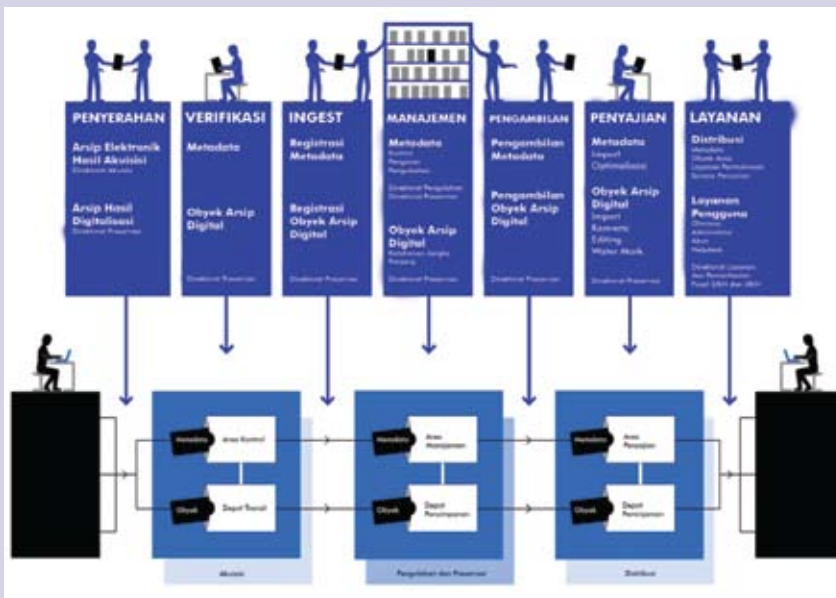
bersifat analog untuk kepentingan jangka panjang. ANRI merupakan salah lembaga kearsipan di dunia yang tidak hanya mengelola arsip dalam bentuk tekstual, tetapi juga arsip bentuk audiovisual. Oleh karenanya, ANRI harus melakukan digitalisasi untuk kedua jenis arsip tersebut. Hal ini menyebabkan ANRI harus memiliki kapasitas penyimpanan data yang besar karena jenis data yang dikelola termasuk kategori *Big Data*.

### Proses dan Sistem Pengelolaan E-Depot ANRI

Proses dan sistem pengelolaan E-Depot menggunakan model yang diadopsi dari *Nationaal Archief* (Arsip Nasional Belanda) dan *Stadarchief Amsterdam* (Arsip Kota Amsterdam). Belanda merupakan salah satu pionir kegiatan preservasi digital di bidang kearsipan yang sudah memulai pembangunan e-Depot sejak satu dekade yang lalu. Hingga saat ini, mereka masih melakukan pengembangan kegiatan ini.

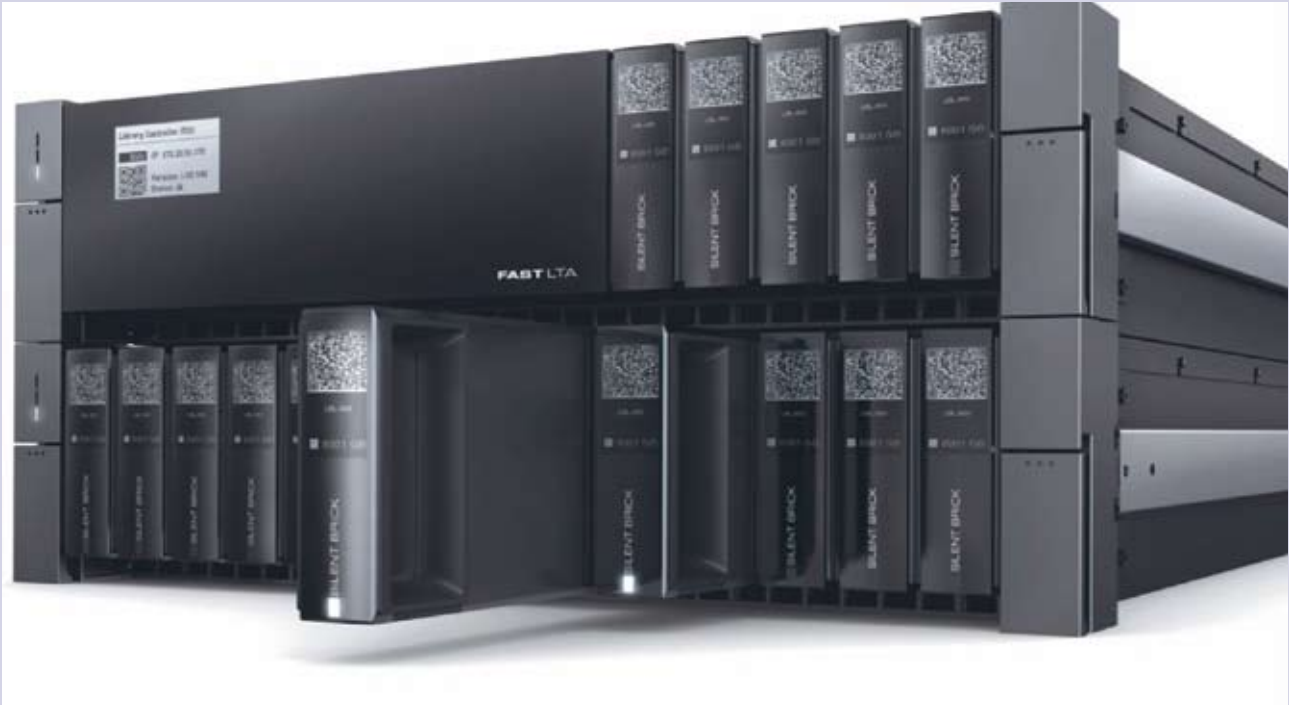
Proses *Ingest* dalam e-Depot ANRI terdiri dari beberapa kegiatan yaitu penerimaan SIP dari Direktorat Akuisisi (untuk *born-digital records*) dan Sub Direktorat Reproduksi dan Digitalisasi (untuk *digitized archives*), verifikasi atau *quality assurance* terhadap *Submission Information Package* (SIP), penciptaan *Archival Information Package* (AIP) sesuai dengan format dan standar, pemisahan *Descriptive Information* (Metadata) dari AIP, dan pengkoordinasian pemutakhiran proses penyimpanan arsip dan manajemen data. Proses ini juga melakukan fungsi autentikasi arsip digital.

Proses penyimpanan arsip (*Archival Storage*) oleh Management dalam rangka pelayanan pada e-Depot dan penemuan kembali AIP. Kegiatan pada proses *Archival Storage* meliputi penerimaan AIP dari proses *Ingest*



Proses dan Sistem Pengelolaan E-Depot ANRI





Storage WORM

yang kemudian ditempatkan pada e-Depot untuk penyimpanan secara permanen, pengelolaan hierarki dalam e-Depot, pemeriksaan rutin dan khusus terhadap kesalahan atau kerusakan dalam e-Depot, penyediaan *Disaster Recovery Center*, dan penyiapan AIP untuk kebutuhan akses. Proses ini dilakukan sepenuhnya oleh Sub Direktorat Penyimpanan Arsip.

Proses manajemen data merupakan proses pengelolaan Informasi Deskriptif tentang khazanah arsip dan data administrasi pengelolannya. Manajemen Data meliputi pengelolaan dan pemutakhiran metadata dan penyajian data dalam rangka akses, serta pelaporan permintaan akses. Proses ini dilakukan oleh Direktorat Pengolahan untuk Metadata Deskriptif dan Direktorat Preservasi khususnya Subdirektorat Penyimpanan Arsip untuk Metadata Administratif dan Subdirektorat Reproduksi dan Digitalisasi untuk Meta data Teknis.

Proses administrasi e-Depot adalah pengelolaan sistem secara keseluruhan. Administrasi meliputi

pembuatan kesepakatan proses *ingest* SIP, verifikasi SIP terhadap standar dan pengelolaan *hardware* dan *software*, penyediaan sistem untuk monitoring dan pengembangan khazanah arsip e-Depot, serta penetapan pedoman dan kebijakan tentang tata kelola e-Depot. Proses ini dilakukan oleh Direktorat Preservasi bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi.

Perencanaan Preservasi meliputi monitoring terhadap lingkungan e-Depot, pembuatan rekomendasi dan rencana preservasi dalam rangka pelestarian arsip digital dalam jangka panjang pada e-Depot, evaluasi terhadap konten arsip, rekomendasi terhadap pemutakhiran data khazanah e-Depot, rekomendasi migrasi khazanah arsip digital, rekomendasi penerapan standar, penyiapan analisa dampak resiko secara berkala, monitoring perubahan terhadap teknologi dan perkembangan kebutuhan akses dari pengguna. Perencanaan preservasi juga menciptakan disain penyempurnaan Paket Informasi dan pengembangan

sistem e-Depot. Proses ini dilakukan oleh Direktorat Preservasi bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi.

Proses akses dalam e-Depot meliputi kegiatan pelayanan informasi akses arsip digital yang disimpan di e-Depot kepada pengguna arsip. Proses ini memungkinkan pengguna menemukan informasi arsip digital, melakukan pemesanan, dan menerima obyek arsip digital yang dikehendaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses akses juga mencakup kontrol terhadap pembatasan akses terhadap informasi yang terbatas, verifikasi permintaan, dan pengiriman *Dissemination Information Package* (DIP) kepada pengguna arsip atau ke sistem lain. Proses ini dilakukan oleh Direktorat Preservasi bekerjasama dengan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan serta Pusat SIKN dan JIKN.

#### **Perangkat Lunak (Software)**

Pengelolaan e-Depot ANRI dioperasikan menggunakan sebuah perangkat lunak (*software*) yang

## PRESERVASI

dibuat berdasarkan proses bisnis dan tata kelola (*archival workflow*) serta pendekatan OAIS model yang digunakan e-Depot ANRI. Perangkat lunak ini merupakan aplikasi berbasis jaringan (*web-based application*) yang menggunakan jaringan internal dengan tingkat keamanan yang tinggi (*secure network*). Aplikasi e-Depot harus dibangun dengan *Operating System* yang memiliki kesesuaian (*compatible*) dengan aplikasi lain terutama yang ada di Deputi Bidang Konservasi Arsip dan Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Aplikasi pengelolaan e-Depot adalah aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna (*user-friendly*) dan dibuat dalam bentuk modular yang setiap modulnya disesuaikan dengan fungsi yang dimiliki pihak-pihak yang terdapat dalam Model OAIS yang diterapkan di e-Depot ANRI.

### Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat Keras merupakan sarana dan prasarana fundamental dalam pembangunan e-Depot ANRI. Pengelolaan e-Depot yang modern membutuhkan perangkat keras yang handal dan sesuai dengan trend terbaru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun e-Depot adalah *storage WORM* (*Write Once Read Many*), partisi fisik (*partition*), sistem lantai terangkat (*raised floor system*), serat optik (*fiber optic*), rak server (*server rack*), UPS, peralatan listrik (*electrical work*), alas kabel (*cable tray*).

### Infrastruktur/Prasarana

Prasarana yang memadai mutlak diperlukan dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan e-Depot di ANRI. Penggunaan teknologi tinggi



E-Depot dalam Kerangka SIKN dan JIKN

dalam penyelenggaraan e-Depot membutuhkan dukungan prasarana yang sesuai seperti gedung yang sesuai dengan standar kearsipan dan area *data center*. Gedung yang digunakan merupakan area aman (*secure area*) dan harus melewati area terbatas (*restricted area*) yang tidak dapat diakses oleh publik. Selain itu Ruang yang digunakan untuk e-Depot ANRI merupakan ruangan dengan suhu dan kelembaban yang terjaga. Ruang ini juga dilengkapi sistem pengamanan terhadap api yang tidak menyebabkan kerusakan terhadap perangkat e-Depot.

### E-Depot ANRI dalam Kerangka SIKN dan JIKN

Penyelenggaraan e-Depot ANRI tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamanatkan pembangunan SIKN dan JIKN. Sistem yang dimiliki e-Depot ANRI memiliki *interoperability* yang memungkinkan koneksitas dengan SIKN dan JIKN ANRI. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem *Open Archival Initiative – Protocol*

*for Metadata Harvesting* (OAI-PMH). Dalam sistem ini, E-Depot ANRI menjadi *Data Provider* untuk JIKN yang memiliki peran sebagai Service Provider.

### E-Depot ANRI sebagai Model Preservasi Arsip Digital secara Nasional

Pembangunan e-Depot di ANRI merupakan bukan hanya tonggak perubahan sebuah sistem, tetapi juga perubahan *mind-set* tentang pengelolaan arsip statis khususnya bentuk digital di Indonesia. ANRI selain bertugas mengelola arsip statis bernilai guna nasional juga berfungsi sebagai lembaga pembina kearsipan nasional. Oleh karena itu, e-Depot ANRI akan menjadi model preservasi arsip digital yang dapat diadopsi secara nasional oleh lembaga kearsipan di level provinsi ataupun kabupaten/kota. Dengan demikian, kelestarian dan akses terhadap arsip statis bentuk digital di seluruh Indonesia dapat terjamin untuk kepentingan generasi bangsa di masa yang akan datang.

## Ismawati Retno

# DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYA TERBITKAN EMPAT BUKU PUBLIKASI KEARSIPAN TOKOH SENI DAN BUDAYA

**A**rsip Kota Yogyakarta di penghujung 2016 lalu berhasil menerbitkan 4 (empat) judul buku tentang tokoh seni dan budaya. Keempat judul buku tersebut adalah Wagimin Sang Maestro Blangkon, Subardjo HS Maestro Keroncong Dari Kotagede, Sujud Seniman Penarik Pajak Rumah Tangga, dan SH Mintardja Legenda Cerita Silat Tanah Jawa.

Buku yang ditulis oleh jajaran pejabat fungsional Arsiparis ini merupakan naskah publikasi kearsipan dari hasil kegiatan penelusuran arsip tokoh perseorangan. Budayawan maupun seniman Kota Yogyakarta telah menjadi rahim bagi penciptaan arsip-arsip seni dan budaya yang memiliki nilai guna keabadian dan kesejarahan. Mereka adalah pelaku sejarah yang menjadi informan bagi arsipnya Kota Yogyakarta. Arsip-arsip tersebut perlu diselamatkan sehingga generasi yang akan datang tidak

kehilangan informasi akan seni dan budaya yang dimiliki Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Kota Yogyakarta memiliki tanggungjawab untuk menyelamatkan memori Yogyakarta. Melalui kegiatan penelusuran arsip perseorangan milik seniman yang ada di Kota Yogyakarta, merupakan sebuah upaya melestarikan informasi seni dan budaya yang lahir dan tumbuh di Kota Yogyakarta.

Kegiatan ini penting untuk menyelamatkan arsip-arsip yang dihasilkan dari rekaman peristiwa para pelaku budaya, seniman maupun tokoh masyarakat di Kota Yogyakarta. Arsip-arsip tersebut mengandung informasi kesejarahan dan merupakan arsip statis yang wajib dikelola dengan baik oleh lembaga kearsipan daerah agar dapat didayagunakan untuk kemaslahatan generasi mendatang.

Kegiatan penelusuran arsip diawali dengan melakukan kunjungan kepada para pelaku budaya, seniman dan tokoh masyarakat. Kegiatan penelusuran arsip ini berlangsung sejak bulan Juli hingga Desember 2016. Proses awal kegiatan penelusuran arsip ini dimulai melalui pendataan.

Pendataan dilakukan untuk mengetahui informasi awal dari masing-masing tokoh tersebut. Informasi kemudian dianalisa untuk menentukan kelayakan setiap tokoh. Setelah dinilai layak, dilanjutkan dengan proses administrasi dan persiapan wawancara. Arsip Kota Yogyakarta membagi para Arsiparisnya ke dalam 4 tim. Masing-masing tim menangani satu orang tokoh yang ditentukan.

Proses penelusuran arsip tokoh seni dan budaya di Kota Yogyakarta, selanjutnya dilakukan melalui tahap wawancara sejarah lisan. Melalui wawancara dikumpulkan data



Empat buku publikasi kearsipan tokoh seni dan budaya yang diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

## DAERAH

pendukung yang lebih banyak tentang perjalanan mereka. Informasi dari hasil wawancara sejarah lisan ini tentunya dapat memberikan cerita yang lebih hidup terhadap ketokohan dan karyanya.

Proses penerbitan 4 buah buku ini dimulai dari mengolah hasil wawancara sejarah lisan menjadi transkripsi. Transkripsi ini mulanya ditulis apa adanya dari rekaman suara tanpa mengurung maupun menambahkan. Hal ini sesuai dengan prosedur standar dalam pelaksanaan kegiatan transkripsi kearsipan. Kemudian hasil transkripsi dan data pendukung lain diolah lebih lanjut oleh para arsiparis Kota Yogyakarta menjadi publikasi kearsipan berupa buku biografi tokoh.

Arsip Kota Yogyakarta juga melakukan akuisisi terhadap arsip mereka. Arsip-arsip yang diakuisisi dari para tokoh tersebut berupa arsip tekstual, arsip elektronik, arsip foto dan *ephimera*. Akuisisi dilakukan terhadap arsip yang mengandung informasi tentang kelahiran, pendidikan, perjalanan karier, hasil karya, hingga tentang kisah perjalanan hidupnya.

Hasil dari data penelusuran arsip berupa daftar arsip perseorangan, transkripsi hasil wawancara sejarah lisan, rekaman suara, foto dan video kegiatan menjadi kekayaan khazanah kearsipan di Arsip Kota Yogyakarta.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko, SE, MM mengatakan, "Penerbitan buku ini merupakan upaya untuk menyelamatkan memori arsip yang memiliki nilai bukti kesejarahan dan kebhuktian. Arsip yang terekam melalui jejak para seniman dan budayawan ini akan menjadi bukti kegiatan administrasi, budaya dan intelektual yang akan mampu melintasi jaman". Pihaknya secara khusus mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan mengirimkan beberapa personil ke ANRI Jakarta untuk memperdalam



Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko, menyerahkan terbitan buku berjudul SUBARDJO HS MAESTRO KERONCONG DARI KOTAGEDE kepada seniman keroncong Subardjo HS di ruang pertemuan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

pemahaman kegiatan penelusuran arsip dan penerbitan naskah publikasi arsip pada 20 Oktober 2016 lalu.

"Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah kami mempunyai tugas pokok menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. Dimana arsip merupakan bukti historis dan nilai budaya, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman budaya di lingkungan Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan kegiatan penelusuran arsip ini kami mencari dan mengumpulkannya selengkap mungkin, secara utuh tidak sepotong-potong sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang utuh dan apa adanya. Objektivitasnya harus ada dan kelihatan, oleh karena itu peran penting kami untuk menyelamatkan arsip para tokoh ini sangat tepat untuk kesinambungan sejarah dikemudian hari. Kami juga berharap penerbitan naskah publikasi ini dapat dimanfaatkan untuk layanan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta," jelasnya.

Kegiatan penelusuran arsip tokoh seni dan budaya hingga penerbitan buku publikasinya merupakan bagian

dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1 angka 26 yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip Statis. Menelusuri arsip seniman merupakan salah satu kegiatan strategis yang penting dilakukan untuk menambah khazanah arsip di lembaga kearsipan daerah. Hal ini beralasan karena arsip-arsip tersebut memiliki nilai guna permanen dan nilai kebhuktian yang dapat dijadikan sebagai memori kolektif daerah. Arsip-arsip yang diperoleh dari kegiatan ini tentunya akan menjadi kekayaan khazanah arsip disimpan di lembaga kearsipan daerah.

Penerbitan 4 buku ini menjadi pelengkap kebanggaan bagi Arsip Kota Yogyakarta dalam menutup tahun kerja 2016. Sebelumnya, Arsip Kota Yogyakarta yang mulai 2017 ini dibawah naungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta juga berhasil menorehkan prestasi menjadi jawara dalam Anugerah ANRI Award 2016. Arsip Kota Jogja ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Terbaik Nasional yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dharwis W.U. Yacob

## ***NGA TAONGA SOUND AND VISION: PENJAGA ARSIP FILM DI SELANDIA BARU***

Institusi pemerintahan di Selandia Baru yang bertanggungjawab atas kegiatan kearsipan adalah *Archives New Zealand* dan *Nga Taonga Sound and Vision*. Sejak tahun 2013, *Archives New Zealand* tidak bertanggung jawab untuk pengelolaan arsip film. Tanggung jawab pengelolaan arsip film dialihkan kepada *Nga Taonga Sound and Vision*.

*Nga Taonga Sound and Vision* bertanggung jawab atas pengelolaan arsip film terutama film dokumenter, film buatan pribadi, film berita, iklan televisi, *feature* dan film pendek, serta film dari program televisi. *Nga Taonga Sound and Vision* sebelumnya bernama *New Zealand Film Archive Ngā Kaitiaki O Ngā Taonga Whitiāhua, Sound Archives Ngā Taonga Kōrero and the Television* kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2014 berubah menjadi *New Zealand Archive of Film, Television and Sound Ngā Taonga Whitiāhua Me Ngā Taonga Kōrero* yang pada tahun 2015 berubah menjadi *Nga Taonga Sound and Vision* sampai sekarang. *Nga Taonga Sound and Vision* mendapatkan anggaran dari *Ministry Cultural and Heritage* (Kementerian Kebudayaan dan Warisan Budaya) dan *The Lottery Grants Board* (Badan Lotere).

Selain di Wellington, *Nga Taonga Sound and Vision* memiliki cabang di Auckland yang memiliki fasilitas tayang dan ruang pameran dan juga terdapat di Christchurch yang memfokuskan pada koleksi arsip audio. *Nga Taonga Sound and Vision* menggunakan



Gedung *Nga Taonga Sound and Vision* di Wellington, Selandia Baru, 2016.

aplikasi *medianet*, sebuah aplikasi digital video yang memberikan akses mengenai khazanah arsip film kepada 17 institusi di Selandia Baru. Organisasi pencipta yang tersimpan di *Nga Taonga Sound and Vision* adalah studio rekaman amatir, lembaga penyiaran publik dan lembaga komersial. *Nga Taonga Sound and Vision* memiliki kantor utama di Wellington. Sebagai penanggungjawab pengelolaan arsip film, *Nga Taonga Sound and Vision* memiliki teater dengan 110 kursi, ruang layanan dan ruang tayang, serta ruang pameran yang memamerkan beberapa gambar bergerak.

Adapun khazanah arsip film di *Nga Taonga Sound and Vision* antara lain khazanah gambar bergerak sejumlah  $\pm 160.000$  *item*, arsip audio sebanyak

$\pm 100.000$  *item*, Khazanah TVNZ (Televisi Nasional Selandia Baru) sebanyak 600.000 *item*. Khazanah arsip film tertua yang disimpan adalah arsip film dari tahun 1895. Variasi arsip yang disimpan di *Nga Taonga Sound and Vision* antara lain rekaman suara dan televisi, iklan, videomusik, produksi radio dan permainan komputer dan film dokumenter. Khazanah arsip yang disimpan *Nga Taonga Sound and Vision* memiliki khazanah film arsip dari beberapa dekade seperti khazanah arsip audio pada tahun 1930-an, khazanah arsip film dan televisi dari tahun 1981 pada saat *New Zealand Film Archive* berdiri.

*Nga Taonga Sound and Vision* menjadi bagian organisasi

## MANCANEGARA

internasional seperti AMIA (*Association of Moving Image Archivists*), ARANZ (*Archives and Records Association of New Zealand*), ARSC (*Association for Recorded Sound Collections*), ASRA (*Australasian Sound Recordings Association*), FIAF (*Fédération Internationale des Archives du Film*), FIAT (*Fédération Internationale des Archives du Television*), IASA (*International Association of Sound and Audiovisual Archives*), NOHANZ (*National Oral History Association of New Zealand*), dan SEAPAVAA (*South East Asia and Pacific Audio-Visual Archives Association*).

Khazanah arsip yang disimpan *Nga Taonga Sound and Vision* secara sukarela disimpan oleh lembaga pencipta dan tanpa biaya. *Nga Taonga Sound and Vision* juga mengatur hak intelektual dari lembaga pencipta. Khazanah arsip yang disimpan dikelola dengan aman, terkontrol dengan suhu tertentu, dan diperbaiki jika diperlukan. Sudah banyak judul film sudah bisa ditayangkan di ruangan layanan di Wellington dan Auckland. Sekolah-sekolah bisa meminjam khazanah film yang sudah dimulai pada tahun 2006. Hal ini dilakukan untuk mendukung kurikulum sekolah kemudian dilanjutkan dengan program *Online Classroom* yang dimulai tahun 2013. Pemutaran film secara regular dilakukan di bioskop-bioskop di Wellington yang juga diputar di komunitas-komunitas tertentu. Di tahun 2010, *Nga Taonga Sound and Vision* mampu menyelamatkan 75 buah film yang sudah rusak. Film tersebut diproduksi tahun 1898 sampai dengan tahun 1929. Dari 75 film yang diselamatkan antara lain film yang disutradarai John Ford yaitu yang diproduksi tahun 1923 dengan judul *Maytime*, dan yang diproduksi tahun 1927 dengan judul *Upstream*. Selain sutradara John Ford, film yang diselamatkan adalah film yang diproduksi oleh Hitchcock Film yang



Ruang Layanan *Nga Taonga Sound and Vision* di Wellington, Selandia Baru, 2016.

berjudul *The White Shadow* dan *The Twin Sister*.

Selain film-film diatas, *Nga Taonga Sound and Vision* juga menyelamatkan khazanah arsip film bisu dari Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, banyak film bisu Amerika Serikat dikirim ke Selandia Baru tanpa dikembalikan kembali setelah fim-film tersebut ditayangkan di bioskop-bioskop. Tentunya setelah tidak dikembalikan di Amerika Serikat, banyak film bisu Amerika jadi hancur. *Nga Taonga Sound and Vision* yang memiliki fungsi menyelamatkan arsip film mampu menyelamatkan sekitar

20 persen dari khazanah arsip film bisu Amerika tersebut sampai dengan tahun 2010.

Sistem distribusi film di masa lalu adalah film-film dikirim ke negara-negara tertentu dengan format distribusi yang telah ditentukan sebelumnya dengan menempatkan Selandia Baru sebagai tempat terakhir yang dikirim. Dikarenakan dengan biaya tinggi terutama dengan biaya transportasi dan keadaan film yang mudah terbakar sehingga banyak film yang tidak dikembalikan ke negara pengirim dan akhirnya disimpan di arsip nasional milik



Ruang Penyimpanan arsip film di *Nga Taonga Sound and Vision* di Wellington, Selandia Baru, 2016.

pemerintah yang akhirnya semakin lama semakin rapuh ataupun dijual untuk kepemilikan pribadi. Selain itu, Televisi Nasional Selandia Baru yaitu TVNZ secara regular dari Agustus 2014 juga mengirim arsip-arsip filmnya ke *Nga Taonga Sound and Vision*. Melalui *Ministry Cultural and Heritage* (Kementerian Kebudayaan dan Warisan Budaya), arsip film TVNZ dikirimkan setiap hari ke *Nga Taonga Sound and Vision*. Dalam hal ini, tanggungjawab yang dilakukan oleh *Nga Taonga Sound and Vision* dalam pengelolaan arsip film sangat banyak meskipun hanya terfokus dalam pengurusan arsip film

Peranan *Nga Taonga Sound and Vision* dalam penyelamatan arsip film

di Selandia Baru sangatlah penting terutama dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang menuntut agar penyelamatan arsip film juga harus dilakukan dengan cepat dan juga dengan teknologi yang canggih pula. Memang, biaya penyelamatan arsip film tidaklah rendah namun bila dilakukan dengan pengelolaan arsip yang benar akan mampu meminimalisir biaya perawatan arsip film. Selandia Baru bisa menjadi contoh negara yang mampu mengelola arsip film dengan baik. Dengan dibentuknya *Nga Taonga Sound and Vision*, penyelamatan arsip film dapat dilakukan dengan baik. Dengan pemisahan tanggung jawab dengan *Archives New Zealand*, *Nga Taonga Sound and Vision* mampu menyelamatkan arsip film secara

efektif tidak hanya arsip film milik Selandia Baru bahkan arsip film yang dimiliki dunia yang tidak mampu dikelola oleh negara-negara lain. *Nga Taonga Sound and Vision* dapat juga menjadi contoh bagi Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip film serta bagaimana bentuk pelayanan arsip film terhadap publik. *Nga Taonga Sound and Vision* dapat dijadikan contoh pengelolaan arsip film yang profesional sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai arsip film dapat terpenuhi baik dengan aksesnya maupun pelayanannya.

# PENJAGA AUTENTIKASI ITU BERNAMA TATA NASKAH DINAS

**A**ktivitas dalam suatu instansi tidak terlepas dari kegiatan korespondensi yang dilaksanakan dari unit ke unit di dalam instansi tersebut, maupun dari instansi ke instansi lainnya. Urusan surat menyurat pada suatu instansi bukan sesuatu hal yang sederhana atau bisa berjalan begitu saja tanpa pengaturan yang pasti. Oleh karena kasus hukum baik pidana maupun perdata yang membelit instansi atau lembaga tidak sedikit yang disebabkan upaya pemalsuan surat atau naskah dinas lainnya. Kasus yang pernah terjadi pada Tahun 2009, mencengangkan bagi dunia kearsipan, yaitu kasus pemalsuan surat keputusan MK tentang sengketa pemilu Sulawesi Selatan. Persoalan tersebut menemukan titik terang yang akhirnya memberi kesimpulan bahwa suatu arsip yang asli namun tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungannya (karena belum dibubuhi cap dinas dan belum dicatat pada buku registrasi naskah dinas keluar) akan berisiko dipalsukan dengan arsip yang mengandung informasi yang menyesatkan.

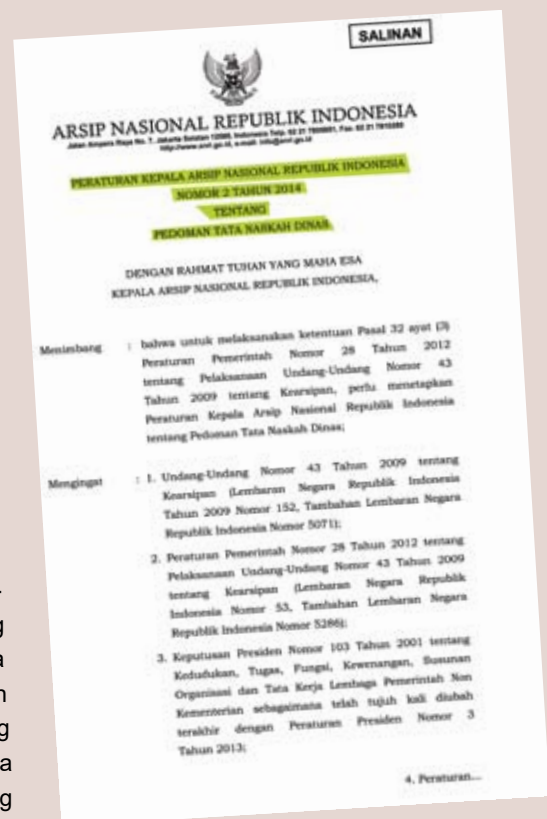
Dari masa ke masa, persoalan naskah dinas palsu tidak jarang membelit pimpinan pemerintahan daerah, beredarnya ijazah palsu yang merupakan salah satu jenis naskah dinas, menjadi senjata yang dapat menggulingkan kekuasaan mereka. Melihat potensi kasus terkait naskah dinas, sehingga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai satu-satunya lembaga yang diberi tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan

nasional oleh undang-undang, dimana di dalamnya termasuk penetapan kebijakan di bidang kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip, yang dimulai dari penciptaan arsip, mengeluarkan produk hukum yaitu Pedoman Tata Naskah Dinas. Pedoman tersebut dikeluarkan ANRI pada Tahun 2014 melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Melalui pedoman tersebut, pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi diarahkan untuk menjaga autentikasi naskah dinas yang berlaku di lingkungan instansi masing-masing melalui penetapan pengaturan tata naskah dinas di lingkungannya oleh pimpinan tertinggi instansi tersebut. Betapa pentingnya pengaturan tersebut mengingat penyelenggaraan kearsipan yang menyangkut tujuannya pada penjaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Bagaimana jadinya suatu instansi tanpa pengaturan

tata naskah dinas di lingkungannya, tentu rentan dengan kemunculan naskah-naskah dinas dianggap asli ditandatangani oleh pejabat di lingkungannya, namun ternyata lemah karena tidak ada kekuatan hukum yang mengatur pembakuan format naskah dinas tersebut. Pada suatu instansi tanpa pengaturan tata naskah dinas, pada unit kerja satu dengan unit kerja lainnya bisa berbeda format naskah dinas padahal seharusnya sama karena keluar dari satu payung instansi yang sama. Ketika instansi tersebut



Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.



terbelit kasus hukum maka urusan naskah dinas ini menjadi belenggu dalam keabsahan pembuktiannya. Dengan demikian, pembakuan naskah dinas itu perlu diatur untuk menjamin keautentikan arsip sehingga sah sebagai alat bukti. Selain itu, menghindari upaya pemalsuan naskah dinas yang dilakukan pihak lain.

Peraturan tanpa *good will* dari pemangkunya adalah bicara kosong, atau dalam bahasa hukum dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Dalam penerapannya, peraturan memerlukan kekuasaan untuk mendukungnya. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena peraturan bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan peraturan tidak dapat berjalan maksimal. Kekuasaan di sini dimaksudkan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemangku di bidang kearsipan, yaitu pimpinan pencipta arsip, unit kearsipan, dan unit pengolah. Kondisi yang dimaksud “bicara kosong” atau “angan-angan” terjadi apabila instansi sudah memiliki kebijakan tata naskah dinas, akan tetapi fungsi penjagaan itu kendur atau bahkan tidak berjalan, hal itu akan menjadi *boomerang* bagi instansi tersebut. Akibatnya, naskah-naskah asli tetapi ternyata palsu, karena tidak sesuai dengan pengaturan tata naskah dinas, akan beredar tanpa terkendali. Dengan demikian, unit pengolah yang merupakan satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, harus mengencangkan perannya sebagai pengendali pada fase penciptaan arsip dimulai.

Pengendalian naskah dinas, lebih jauh, bukan hanya persoalan format naskah dinas, melainkan juga pengamanan naskah dinas, sehingga fisik naskah terjaga dan informasi yang ada di dalamnya terjamin hanya

sampai kepada pihak yang seharusnya. Pengamanan naskah dinas tidak hanya meliputi pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses, namun untuk jenis naskah tertentu dapat dilakukan dengan pemberian nomor seri dan *security printing*. Istilah *security printing* dikenalkan sebagai langkah pengamanan tingkat tinggi biasanya untuk arsip dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses terbatas dan sangat rahasia atau arsip dengan kategori vital dan terjaga. Pada praktiknya, upaya pengamanan jenis ini dapat dituangkan pada arsip-arsip keintelijenan, arsip perjanjian internasional, dan arsip kepemilikan aset. Pada instansi pemerintahan di Indonesia, upaya ini masih jarang dilakukan. Langkah minimal pemberian *security printing* yang telah dilakukan berupa pembubuhan *watermark* pada naskah dinas.

Sedemikian rupa langkah pengendalian naskah dinas ini dirancang sebagai upaya menjaga keautentikan naskah dinas pada suatu instansi sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di mata hukum. Potensi kisruh persoalan autentikasi naskah dinas selalu siap mengincar setiap instansi selama ia berdiri. Selanjutnya, ancaman kehilangan aset, bahkan sampai pada penggulingan suatu kekuasaan, bisa bermula dari lembaran naskah yang kerap luput dari pengamatan kita. Maka mulai saat ini persoalan korespondensi bukan lagi merupakan hal sederhana yang dapat diacuhkan. Instansi perlu memiliki kesadaran yang tinggi terkait hal tersebut dengan mencanangkan pengaturan tata naskah dinas. Jikapun instansi telah memiliki pengaturan tersebut, maka para pemangkunya mulai memantapkan peran mereka sebagai penjaga keautentikan naskah dinas.

Persoalan tata naskah dinas telah dibidik oleh ANRI melalui kegiatan pengawasan kearsipan yang dilakukan

pada Tahun 2016 pada Kementerian dan Pemerintahan Daerah. Selain muatan materi pada pengaturannya, hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pun ikut dicermati. Hasilnya, masih ditemukan instansi pemerintah yang belum memiliki pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungannya. Selain itu, instansi dinilai belum patuh mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Ketaatan terhadap Peraturan Kepala ANRI tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut karena terkait kewenangan atribusi yang melekat pada ANRI sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan nasional, yang di dalamnya meliputi penetapan kebijakan nasional. Temuan hasil pengawasan terkait tata naskah dinas merupakan marka pengingat bagi penyelenggara pemerintahan untuk mulai memperbaiki “hulu” pengelolaan arsip dimulai dari penciptaannya.

Bicara tata naskah dinas, erat kaitannya dengan pengaturan identitas suatu instansi. Muatan materi tentang logo, stempel, kop surat, serta atribut lain yang melekat pada naskah dinas perlu diatur pada masing-masing pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Pengendalian naskah dinas dalam fase penciptaan arsip merupakan upaya awal menuju terbit arsip khususnya dalam pengelolaan arsip dinamis. Penciptaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (YU)

# HARD DISK STORAGE WORM PILIHAN TEPAT UNTUK MENDUKUNG PELESTARIAN ARSIP DALAM FORMAT DIGITAL

Dengan semakin cepatnya tren perkembangan IT, pelestarian digital (*digital archiving*) menjadi semakin penting. Hanya dengan mengandalkan *back up* untuk memenuhi ketentuan pelestarian tidaklah cukup, karena tujuan *back up* berbeda dengan tujuan pelestarian, namun demikian *back up* tetap menjadi bagian dari program pelestarian yang baik dalam konteks dalam bentuk pusat pemulihan data pasca bencana (*disaster recovery center*).

Pelestarian digital adalah proses di mana informasi, yang biasanya tidak lagi diubah-ubah akan dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, dipindahkan dan disimpan pada suatu tempat (sarana) penyimpanan jangka panjang berbasis TIK. Banyak sekali tantangan terkait pelestarian digital, di antara yang terpenting adalah ketahanan objek digital untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini terkait dengan keusangan teknologi yang menimbulkan risiko di mana objek digital yang telah dilestarikan tidak dapat diakses. Penyegaran teknologi secara berkala untuk menjamin bahwa data (objek digital) dan sistem yang ada dimigrasikan ke lingkungan teknologi yang lebih baru, dengan tetap menjaga autentisitas, integritas dan readibilitas atau keterbacaan dari data, merupakan salah satu langkah untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Namun demikian, proses pelestarian arsip dalam format digital

juga menghadapi tantangan lain, yakni terjadinya kemungkinan perubahan, penghapusan, atau pemusnahan dari pihak yang tidak berhak selama proses penyimpanan, jika perangkat yang digunakan tidak mendapat perlindungan khusus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pelestarian arsip tidak hanya menyangkut masalah program migrasi, pilihan model pelestarian digital (misalnya penerapan *reference model Open Archival Information System* atau OAIS), melainkan juga pilihan tepat perangkat keras (*hardware*) pendukungnya.

Untuk memenuhi tujuan ini, suatu sistem penyimpanan untuk pelestarian digital yang baik setidaknya memiliki syarat: 1) Memiliki kemampuan untuk menjaga arsip dalam format digital yang disimpan dari tindakan perubahan dan penghapusan (pemusnahan) dari pihak mana pun, termasuk dari akibat serangan virus, *malware*, sabotase, kesalahan administrator ataupun kegagalan infrastruktur, selama masa retensinya atau selama-lamanya jika arsip tersebut adalah arsip statis; 2) Memiliki perlindungan dan pemulihan bencana misalnya *disaster recovery center* (DRC); 3) Menjalankan migrasi data dalam rangka menghindari keusangan teknologi secara rutin; 4) Memiliki antarmuka standar dengan sistem ECM (*enterprise content management*); 5) Memiliki fleksibilitas dan skalabilitas sesuai dengan perubahan kebutuhan.

Dalam artikel ini, Penulis akan membahas mengenai syarat pertama di atas, yang secara khusus difokuskan pada penyimpanan arsip bernilai guna permanen dengan infrastruktur perangkat WORM. Namun, sebelum membahas mengenai WORM, ada baiknya kita memahami konsep 'archiving' yang dalam konteks ini dimaknai sebagai sebagai pengarsipan digital atau pelestarian digital dan konsep 'back up'.

## 'Archiving' dan 'Back up'

Kadangkala banyak orang berpendapat bahwa *archiving* adalah istilah lain dari *back up*, padahal pada kenyataannya kedua hal tersebut menjalankan fungsi yang berbeda.

Fungsi dari *back up* adalah membuat suatu kopi duplikat dari data primer dalam rangka melindungi hilangnya data tersebut akibat kegagalan perangkat keras, kesalahan pengguna, atau korupsi yang terjadi pada data itu sendiri. Dengan *back up*, kopi dari data produksi disimpan dalam suatu format hemat biaya dan ditempatkan pada ruang khusus yang terpisah (*offsite*). Biasanya *back up* dimaksudkan hanya untuk suatu periode waktu yang terbatas.

Tujuan *back up* adalah untuk meminimalkan dampak pada kelangsungan bisnis di mana akses terhadap informasi dapat dipulihkan secara cepat bilamana terjadi kasus hilangnya informasi. *Back up* biasanya

merupakan kopi dari data asli dan sering berubah dari waktu ke waktu.

Sedangkan *Archiving* merupakan suatu proses yang sistematis dan dirancang secara khusus untuk menyimpan secara aman konten yang sangat berharga dalam format yang tidak mungkin untuk diubah-ubah (*unalterable*) dan tahan terhadap kerusakan (*tamper-proof*) untuk jangka waktu yang lama, bukan hanya antara 7 hingga 10 tahun melainkan dapat diperpanjang hingga 30 hingga 90 tahun, bahkan lebih. Solusi archiving ini mengamankan aksesibilitas dan readibilitas konten sepanjang daur hidup data/informasi yang disimpan.

Tujuan dari *archiving* adalah untuk menciptakan khazanah data yang sudah tetap (tidak berubah-ubah lagi) untuk disimpan untuk waktu yang lama. Terkait dengan tujuan tersebut, kecepatan mungkin bukan menjadi fokus utama, yang penting adalah data (objek digital) tersebut dapat dicari dengan mudah dan dibaca. *Archiving* biasanya dilakukan terhadap data atau objek digital asli atau kopi autentiknya.

### Write Once Read Many (WORM)

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu ketentuan kunci dari sistem penyimpanan untuk pelestarian suatu objek digital adalah perlindungan WORM di mana objek digital yang disimpan tidak dapat diubah-ubah atau dihapus (dimusnahkan) selama retensinya atau selama arsip tersebut dilestarikan. Dengan menggunakan media WORM, terhapusnya atau musnahnya arsip karena tindakan yang tidak disengaja tidak akan terjadi.

Perangkat penyimpanan komputer WORM diperkenalkan pertama kali diakhir tahun 1970-an. WORM merupakan suatu teknologi penyimpanan data yang memungkinkan informasi ditulis pada suatu *diska*

| Karakteristik Perangkat                     | Archiving | Back up        |
|---|-----------|----------------|
| Cepat mengembalikan data dalam jumlah besar | Tidak     | Ya             |
| Mudah diakses                               | Ya        | Tidak          |
| Memasukkan data asli                        | Ya        | Tidak          |
| Rewritable (dapat ditulis ulang)            | Tidak     | Ya             |
| Untuk jangka panjang                        | Ya        | Biasanya tidak |
| Berisi data tidak berubah                   | Ya        | Biasanya tidak |
| Kapasitas dapat diperluas                   | Ya        | Ya             |
| Pengaturan sedikit dan mudah                | Ya        | Ya             |
| Fisik terpisah dari pusat data/organisasi   | Tidak     | Ya             |
| Hemat energi                                | Ya        | Tidak          |
| Kontrol data mudah                          | Ya        | Tidak          |
| Non-proprietary (non vendor lock-in)        | Ya        | Tidak          |

Tabel Perbedaan Karakteristik *Archiving* dan *Back up*

| Karakteristik  | RAID  | Optik     | Tape/RDX | HD-WROM (Silent Cube) |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------------------|
| Mudah diakses  | Ya    | rata-rata | Tidak    | Ya                    |
| Non-rewritable | Tidak | Ya        | Tidak    | Ya                    |

hanya sekali waktu dan mencegah *drive* menghapus data tersebut. *Diska* tersebut memang disengaja tidak dapat ditulis ulang (*rewritable*) karena dimaksudkan secara khusus untuk menyimpan data yang tidak ingin dihapus atau dimusnahkan. Karena fitur inilah, maka perangkat WORM telah lama digunakan untuk tujuan kearsipan baik di lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah. Perangkat ROM dalam bentuk *diska* diawali dengan ukuran yang bervariasi mulai dari lebar 5.25 inci hingga 14 inci dengan ukuran penyimpanan mulai dari 140MB hingga lebih dari 3 GB per satu sisi, (biasanya) dengan media dua sisi (*double-sided*). Untuk kebutuhan *back up*, pada akhir 1990-an diperkenalkan media simpan *Linear Tape-Open (LTO)*. Pada tahun 2005 dikembangkan LTO-3 versi WORM. LTO-7 WORM yang diperkenalkan pada Desember 2015 memiliki kapasitas hingga 6 TB. Baik WORM dengan media optik maupun media tape (*magnetic tape*) keduanya dapat dipindah-pindahkan, sehingga cocok untuk menyimpan data untuk jangka

panjang. Media optik memungkinkan akses langsung ke data yang disimpan sehingga dapat mempercepat temu balik data. *Media tape* memungkinkan akses sekuensial ke data yang cocok untuk menyimpan data yang sangat jarang ditemu balik.

Perlindungan WORM tidak selalu difasilitasi dengan menggunakan media penyimpanan dengan bahan dasar diska seperti CD-ROM, DVD-ROM atau tape sebagaimana dikemukakan di atas. Fungsi tersebut pada dasarnya dapat digantikan dengan perangkat lunak kontrol (*microcode*) yang ditanamkan dalam suatu sistem penyimpanan untuk pelestarian. Dengan demikian sistem tersebut dapat menyimpan data pada hard disk biasa yang dapat ditulis ulang (*rewritable*) dan perangkat lunak kontrol akan menyediakan *logical WORM protection* yang akan mencegah *hard disk* tersebut ditulis ulang atau informasi di dalamnya dihapus sebelum waktu yang ditetapkan. Keuntungan dari *logical WORM protection* adalah ruang penyimpanan pada *hard disk* dapat

| (WORM)                       |       |       |       |    |
|------------------------------|-------|-------|-------|----|
| Aman untuk jangka panjang    | Tidak | Ya    | Tidak | Ya |
| Kapasitas dapat diperluas    | Ya    | Ya    | Ya    | Ya |
| Pengaturan sedikit dan mudah | Ya    | Tidak | Tidak | Ya |
| Hemat energi                 | Tidak | Ya    | Ya    | Ya |
| Kontrol data mudah           | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| Non-proprietary              | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |

**Tabel Karakteristik Media Simpan untuk Archiving**

digunakan kembali begitu sudah terdapat data yang kadaluarsa atau dihapus.

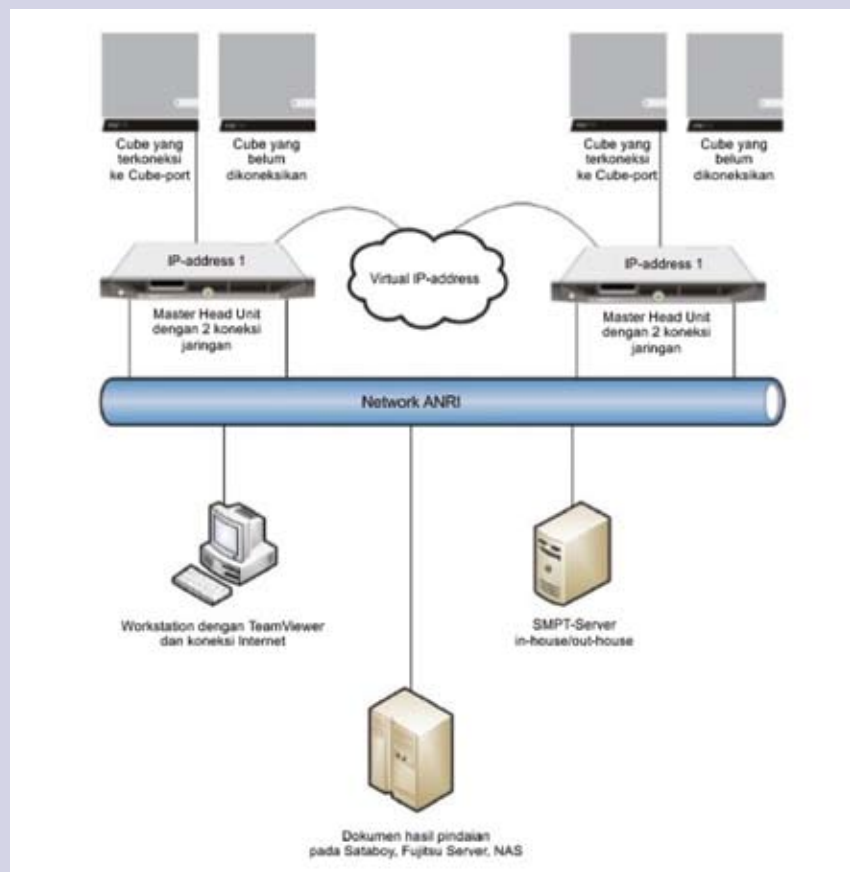
Teknologi disk WORM saat ini menawarkan kinerja dan kapasitas yang sangat besar, namun dengan biaya penyimpanan yang relatif rendah. Berbagai jenis hard disk WORM diproduksi oleh produsen perangkat keras TIK dunia, seperti Hitachi Data Systems, EMC Centera, Network Appliance (NetApp), KOM Networks, Comex, Greentec, dan lain-lain. WORM saat ini juga sudah kompatibel dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, OSX, VMware, Red Hat dan sistem-sistem operasi lainnya. Antarmuka SATA, eSATA, USB yang standar memungkinkan untuk mengelolanya dengan mudah dan berintegrasi dengan lingkungan teknologi informasi yang ada. WORM server memfasilitasi tidak hanya penyimpanan lokal maupun *remote* yang tidak terbatas dalam konfigurasi NAS (*network attached storage*) atau SAN (*storage area network*) yang dapat dipasang sejumlah *drive* pada satu sasisnya, besarnya kapasitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari 500GB hingga beberapa *pentabyte* dan tetap dapat diperluas.

Perbedaan antara WORM server dan *file server* biasa terletak pada program yang ditanamkan pada perangkat kerasnya. Pertama, seseorang tidak dapat mengunggah

program-program ke WORM server dan menjalankannya di sana. Antarmuka server dibatasi sedemikian rupa sehingga hanya kode sistem file tertentu yang diberikan oleh vendor dapat dioperasikan dalam server tersebut. Oleh karena itu kode yang ditulis oleh pihak lain harus ditempatkan pada perangkat lainnya dan selanjutnya mengakses server WORM melalui API (*application*

*programming interface*) dari server tersebut. Pembatasan ini membantu mengurangi ukuran dari basis kode yang dipercaya (*trusted code base*), yang merupakan prinsip dasar dalam membangun suatu sistem yang aman.

Meskipun kebanyakan WORM server menggunakan *magnetic disk* untuk menyimpan data, suatu perangkat lunak menetap (*firmware*) yang merupakan program yang telah disimpan di dalam PROM (*Programmable Read Only Memory*) yang menjadi salah satu komponen tetap server yang bersangkutan akan mengaplikasikan perintah semantik *write-once*. Begitu suatu file telah ditetapkan (setelah diberi masa tunggu tertentu), WORM akan menjamin bahwa file tersebut akan imun dari semua perubahan ataupun penghapusan selama masa retensi yang ditetapkan oleh



Gambar Konfigurasi Sistem Pelestarian Arsip Statis VOC di ANRI

administrator. Pada sejumlah WORM server yang terdapat di pasaran saat ini menyediakan jaminan imutabilitas yang sangat kuat, dimana administrator pun tidak dapat menggantikan (*overwrite*), mengubah masa retensi, atau menghapus suatu *file* yang belum kadaluarsa begitu *file* tersebut telah ditetapkan untuk untuk disimpan dalam suatu WORM server. Disamping itu WORM server juga menggunakan suatu penetapan waktu yang benar-benar dapat dipercaya dan tidak akan berubah-ubah (*trustworthy and tamper-proof clock*).

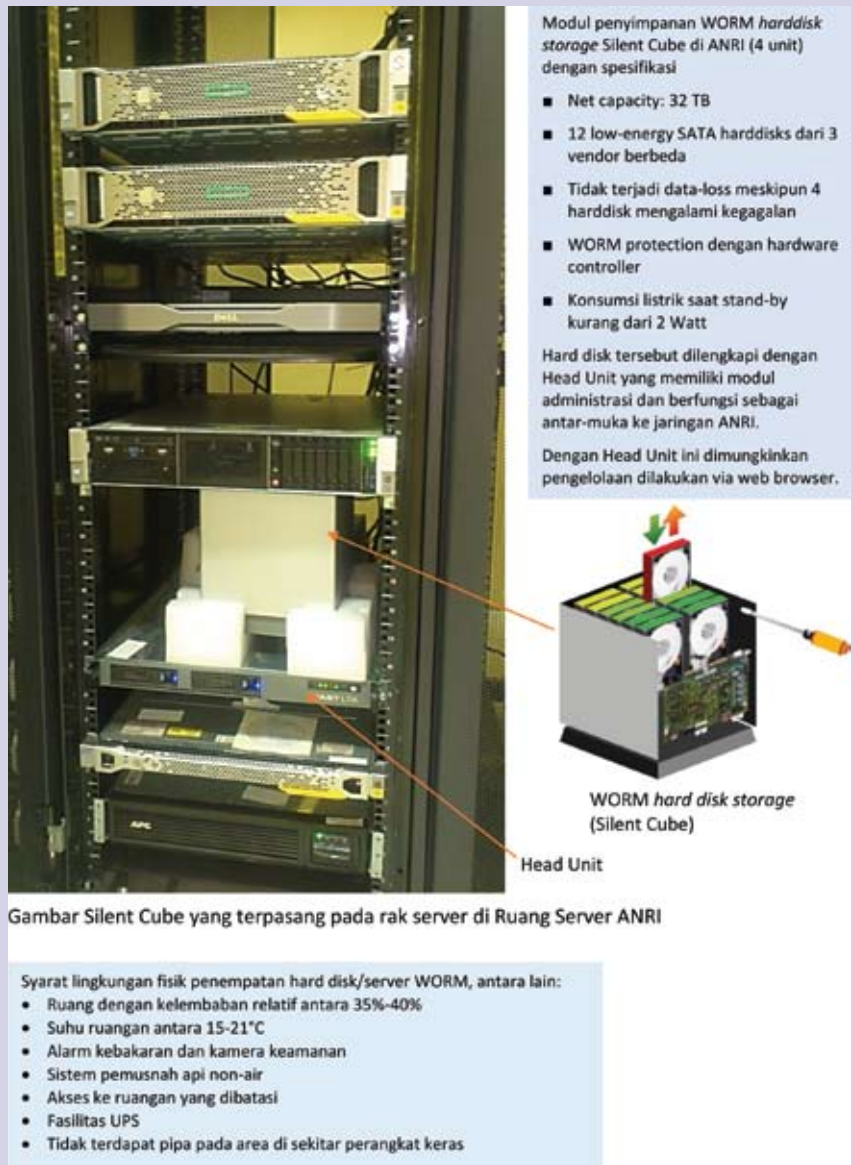
### Penggunaan Sistem Pelestarian Arsip Statis dengan Hard Disk WORM di ANRI

Penggunaan media WORM (*hard disk/server WORM*) untuk pelestarian arsip statis di ANRI dilakukan pertama kali pada proyek DASA (*Digital Archives System at ANRI*) yang merupakan kerja sama antara ANRI dan The Corts Foundation (TCF). Kerja sama dilakukan dalam rangka pelestarian digital dan publikasi khazanah arsip VOC abad ke-17 dan ke-18.

Perangkat sistem penyimpanan untuk pelestarian (*archives storage system*) yang dipergunakan adalah hard disk WORM *Silent Cube* yang diproduksi oleh COMEX, sebuah perusahaan khusus di bidang manufaktur dan distribusi CD/DVD/BD, peralatan duplikasi, sistem publikasi optik, *digital storage* dan *archive storage system* yang berbasis di Eropa.

### Penutup

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa media WORM (*hard disk/server WORM*) sangat cocok untuk mendukung program pelestarian arsip statis dalam format digital di lembaga kearsipan. Namun demikian, untuk penerapannya perlu perencanaan yang baik yang menyangkut tidak hanya pengadaan perangkat TIK dan



Gambar Silent Cube yang terpasang pada rak server di Ruang Server ANRI

konfigurasi sistemnya, melainkan juga SDM (TIK dan kearsipan), standar dan prosedur pelestarian digital, misalnya SOP digitalisasi, standar produk hasil digitalisasi untuk preservasi, dan lain-lain. Jika tidak, misalnya terjadi kesalahan dalam konfigurasi sistem oleh administrator, maka perangkat WORM tersebut tidak akan berguna. Atau jika, objek digital yang akan disimpan di dalam perangkat tersebut berkualitas rendah baik dari sisi teknis maupun dari sisi autentisitas, integritas dan reliabilitasnya, maka pemanfaatan perangkat WORM tersebut tidak

maksimal. Pelestarian khazanah arsip VOC melalui program digitalisasi yang dilakukan oleh ANRI bersama TFC dalam proyek DASA dapat menjadi contoh yang baik terkait pemanfaatan perangkat WORM dalam rangka melestarikan arsip dalam format digital. Saat ini, sekitar 30 TB arsip statis VOC hasil digitalisasi dengan kualitas preservasi telah tersimpan dengan baik di ANRI dalam perangkat *hard disk WORM Silents Cube*. (MR)

Rina Rakhmawati

# INDONESIA VISUAL ART ARCHIVES (IVAA): GERAKAN SADAR ARSIP PARA SENIMAN YOGYAKARTA

**S**eni merupakan salah satu unsur budaya yang menjadi identitas khas suatu peradaban. Ia mengejawantahkan bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitar maupun suatu penafsiran manusia tentang kehidupan. Kegiatan berkesenian merupakan upaya manusia menafsirkan diri dan lingkungan sehingga menghasilkan produk seni, baik berupa lukisan, fotografi, film, dan sebagainya. Dalam konteks kearsipan, produk seni dapat dikatakan sebagai arsip karena merekam kegiatan berkesenian yang

dilakukan oleh seniman, secara individu maupun kolektif.

Seni, bagi Yogyakarta, telah menjadi urat nadi kehidupan sebagian besar masyarakatnya. Setiap jengkal wilayah Yogyakarta menyimpan banyak kisah kegiatan berkesenian. Meski pun demikian, tidak banyak yang berusaha mengarsipkan rekam jejak kegiatan berkesenian tersebut. Produk seni lebih banyak disimpan oleh seniman itu sendiri dan kerap kali tidak banyak menjadi kajian hingga lapuk dan rusak. Akibatnya, tidak

sedikit generasi muda seniman yang tiada mengenal para sesepuh seni yang telah lama berkkiprah beserta prestasi seninya.

## Gerakan Sadar Pengarsipan Seni

Pengarsipan karya seni rupa masih menjadi hal yang asing di Indonesia. Tidak banyak praktisi maupun akademisi kearsipan yang mengategorikan karya seni sebagai arsip. Fakta tersebut berujung pada pengetahuan para pelaku seni yang masih minim, baik individu maupun kolektif, tentang pengarsipan karya

Archive Showcase  
**Indonesian  
Performance Art  
from 1990  
to Present**

---

May 23 rd - Juli 1st 2016  
Monday - Friday 09 am - 05 pm

---

Indonesian Visual Art Archive (IVAA)  
Jl. Ireda, Gg. Hiperkes, Dipowinatan, MG1/ 188 A-B,  
Keparakan, Yogyakarta 55152 Indonesia  
Phone/Fax: +62 274 375262 | Mobile: +62 81 7941 7950  
[www.ivaa-online.org](http://www.ivaa-online.org)



Luna Dian AS | Membakar dingin

Sumber: <http://ivaa-online.org>

seni yang sistematis dan terstandar. Akibat jangka panjang selanjutnya adalah kerusakan fisik karya seni yang rawan terhadap kerusakan dan hilangnya memori publik tentang para senimannya.

David Roberts, dalam *Keeping Archives 2nd*, mengkategorikan karya seni (*art work*) sebagai arsip bentuk khusus karena wujud arsip yang khas dan spesifik. Karya seni menjadi media seniman untuk merekam fenomena alam maupun interaksi sosial masyarakat yang memiliki nilai unik dan bersejarah. Pemikiran tersebut menjadi fondasi dasar dari beberapa negara untuk melakukan kerja pengarsipan karya seni sehingga identitas kesenian bangsanya melekat kuat dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Turki menjadi salah satu negara yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan arsip seni rupa, khususnya bagi negara-negara berkembang. Selale Korkut dalam *Documenting the Arts in Turkey: The Turkish Plastic Arts Archive at the Bilkent University Library*, seni rupa

Turki telah mengalami perkembangan yang pesat. Namun demikian, akar seni rupa Turki masih sulit untuk ditelusuri dan dipahami karena minimnya sumber rujukan yang merekam kegiatan berkesenian tersebut. Fakta tersebut menjadi salah satu dasar untuk memulai proyek pengelolaan arsip seni rupa yang dilakukan oleh *Bilkent University Library*.

Arsip seni, dalam konteks internasional, telah ramai dikaji oleh akademisi maupun praktisi, baik bidang seni maupun kearsipan. Dalam berbagai kajian tersebut, tidak hanya disinggung terkait pengelolaan teknis saja, tetapi juga dampak pemanfaatan arsip terhadap kegiatan seni hingga pemanfaatan arsip seni itu sendiri. Kenneth H. MacFarland, dalam *The Use of Archives in the Field of Art by Graduate Students and Researchers*, memaparkan pemanfaatan arsip karya seni dalam berbagai riset seni. Dalam berbagai riset tersebut, MacFarland menegaskan bahwa “...in the field of art much research is carried on successfully by the use of the mails, the telephone, and the photograph”.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa agar dapat bercerita tentang sejarah seni, arsip karya seni perlu dilengkapi dengan arsip-arsip lainnya, seperti arsip korespondensi, catatan telepon, dan arsip foto. Keberadaan arsip-arsip tersebut pun sebagai upaya klarifikasi terhadap keautentikan arsip karya seni sehingga layak menjadi sumber rujukan penulisan sejarah.

Arsip seni rupa merupakan salah satu khasanah budaya bangsa yang wajib dilestarikan. Oleh karena minimnya perhatian pemerintah dalam mengelola arsip tersebut, maka lembaga independen mengambil langkah mandiri untuk melestarikan arsip seni rupa tersebut. *Indonesia Visual Art Archive (IVAA)* menjadi penggerak kesadaran mengarsipkan berbagai rekam jejak berkesenian secara independen di Yogyakarta.

#### Kerja Pengarsipan Seni di IVAA

Permasalahan mendasar yang menjadi pemantik IVAA untuk bergerak melakukan kerja pengarsipan adalah pemerintah dinilai tidak berhasil dalam



Sumber: <http://ivaa-online.org>



Sumber: <http://ivaa-online.org>

Pameran arsip yang diselenggarakan IVAA

melakukan upaya pendokumentasian ragam seni di Indonesia. Kondisi tersebut dikondisikan sebagai penyebab rendahnya pengetahuan tentang kesenian Indonesia oleh generasi muda. Generasi saat ini tidak memperlihatkan antusiasme yang tinggi dalam hal pemanfaatan arsip seni, terutama di daerah. Tidak sedikit generasi *milenial* yang tidak mengenal seniman-seniman lokal yang karyanya telah banyak mendunia.

Kerja pengarsipan seni yang dilakukan IVAA tidak sekedar menata hingga mempublikasikan arsip dalam berbagai media. Berbagai rupa pameran arsip, diskusi, seminar, hingga pembukuan konsep pengarsipan seni telah digagas dan dihelat. Dalam setiap pameran arsip yang digelar, IVAA berupaya menyajikan tema-tema yang membumi dan *eye-catching* sehingga diharapkan generasi muda, khususnya para seniman muda, tertarik untuk berkunjung dan berpartisipasi. Adapun arsip-arsip seni yang disajikan dalam pameran tidak hanya berupa arsip

tekstual, tetapi juga berupa arsip *audio visual*, salah satunya *performance art archives*.

Pameran arsip dengan beragam tema tidak hanya diselenggarakan di dalam negeri. IVAA pun pernah membawa nama seni Indonesia dalam perhelatan pameran arsip seni di Singapura. Beberapa materi pameran yang dihadirkan IVAA dalam pameran tersebut, antara lain: Pertama, elaborasi mula seni rupa sebagai praktek formal di Indonesia. Penokohan Raden Saleh dan kontroversi seputar penokohan tersebut melalui makalah Harsja W. Bachtiar dan Peter Carey dan rekaman diskusi di TIM antara Dan Soewarjono, Sudjojono, Oesman Effendi. Kedua, latar sosial di Pulau Jawa pasca politik etis, melalui penokohan Ki Hadjar Dewantara dan peran Taman Siswa dalam menumbuhkan identitas kebudayaan Indonesia.

Ketiga, jejak seniman asing di Pulau Bali melalui penokohan Rudolf Bonnet dan Walter Spies dan peran Pita Maha sebagai infrastruktur sosial

bagi orang Bali yang berkesenian sebagai laku budaya dengan asosiasi ritual.

Performa pameran arsip IVAA yang telah mendunia tak lantas membuat IVAA puas dengan kerja pengarsipan yang dilakukan. Dalam upaya mendekatkan hasil kerja pengarsipan kepada publik, IVAA rutin menyelenggarakan diskusi dengan mengundang berbagai seniman.

Langkah nyata selanjutnya yang dilakukan IVAA sebagai upaya mendekatkan publik kepada kerja pengarsipan secara teknis, IVAA menyelenggarakan program magang dengan sasaran masyarakat umum dan mahasiswa. Program magang IVAA ini dinilai lebih membumi karena tidak sekedar membatasi pada masyarakat yang memang sudah mendapatkan bekal ilmu kearsipan. Meski dibuka secara luas untuk masyarakat, IVAA tetap melakukan seleksi terhadap calon peserta magang.

#### Catatan Akhir

Kerja pengarsipan *Indonesia Visual Art Archives* (IVAA) merupakan salah satu wujud nyata gerakan sadar arsip, dalam hal ini adalah arsip seni. Berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan IVAA pun tidak sekedar upaya menyelamatkan khasanah budaya Indonesia, tetapi juga mengenalkan manfaat dari kerja pengarsipan seni yang dilakukan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan teknis arsip seni melalui magang pun menyiratkan maksud supaya publik pun memiliki kesadaran sebagai pengelola, tidak sekedar pengguna arsip. Keselarasan dalam kesadaran masyarakat sebagai pengelola maupun pengguna, diharapkan mampu memperpanjang usia pemanfaatan arsip sehingga generasi mendatang tidak mudah kehilangan memori berkesenian bangsanya sendiri.



Rini Rusyeni

## SERUNYA ARSIP DALAM DUNIA ANAK DI BELANDA



Tampilan komik "Donald Duck als Archivaris"

**A**pa hubungan antara arsip, Arsiparis, dan Donal Bebek? Pasti akan sangat sulit untuk mencari jawaban pertanyaan ini. Tapi inilah cerita yang saya temukan dalam sebuah komik anak-anak berbahasa Belanda yang saya temukan di perpustakaan negara Belanda. Kita tentu mengenal Donal Bebek sebagai salah satu tokoh kartun legendaris yang mendunia dari Disney yang telah menghebohkan jagat komik dengan aksi, cerita, dan bentuk tubuhnya yang lucu dan menggemaskan. Namun apa jadinya jika tokoh Donal Bebek ini diceritakan sebagai seorang Arsiparis yang mengurus arsip-arsip

dan dokumen penting? Apakah Donal berhasil menjadi Arsiparis? Apakah profesi Arsiparis itu bagi seorang Donal Bebek? Berbagai pertanyaan tersebut muncul ketika pertama kali saya melihat judul komik ini. Sebagai pembaca, saya sangat terkesan sekali ketika membaca komik Donal Bebek berbahasa Belanda dengan judul "*Donald Duck als Archivaris*" (Donal Bebek sebagai Arsiparis). Dalam komik tersebut diceritakan pengalaman seru tentang bagaimana Donal Bebek sebagai orang awam dengan segala kecerobohnya mencoba peruntungan baru menjadi seorang Arsiparis yang bertugas

untuk mengurus semua dokumen dan arsip-arsip penting di sebuah lembaga negara. Dalam cerita, Donal digambarkan sebagai seorang awam yang tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan Arsiparis. Dalam menjalankan pekerjaannya, Donal Bebek dengan tingkahnya yang lucu dan ceroboh pertama kali berkenalan dengan berbagai bentuk arsip dan dokumen penting yang harus dilestarikan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Donal Bebek berkali-kali diperingatkan oleh atasannya, seorang Arsiparis senior yang digambarkan sebagai seorang tua yang telah bekerja tanpa lelah menyusun arsip-



Gambar perkenalan Donald dengan Arsip dan Profesi Kearsipan

arsip, untuk selalu menyimpan arsip sesuai dengan klasifikasi yang tepat. Ia mengajarkan Donal Bebek akan pentingnya bagi setiap lembaga dan individu pencipta arsip untuk menjaga dan merawat arsip-arsipnya sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku karena jika arsip-arsip tersebut tidak dikelola dan disusun secara baik maka yang terjadi adalah kekacauan. Tugas Donal adalah untuk terus menjaga dan merawat arsip tersebut agar data-data dan informasi yang terkandung di dalamnya tidak tercampur menjadi satu. Jika itu terjadi maka kekacauan akan terjadi. Namun, apakah Donal berhasil menjaga arsip tersebut? Bisa ditebak, dengan gayanya yang kocak dan ceroboh, semua arsip yang menjadi tanggung jawabnya menjadi tidak karuan. Semua jadi kacau balau, pelayanan masyarakat terganggu dan akhirnya Donal pun didepak dari posisi Arsiparis.

Itulah cerita seru yang ditampilkan dalam komik Donal Bebek berbahasa Belanda yang ditujukan untuk para pembaca yang rata-rata adalah anak-anak berusia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Dalam cerita tersebut, anak-

anak diajarkan dan diperkenalkan dengan arsip dan bahwa arsip ada di sekeliling mereka. Dalam cerita, Donal menganggap bahwa pekerjaan Arsiparis adalah pekerjaan yang tidak mudah. Hal ini memang benar adanya, profesi Arsiparis membutuhkan ketekunan, ketelitian, keseriusan, dan keterampilan khusus. Pekerjaan arsiparis sangat dibutuhkan oleh negara dan masyarakat, oleh karena itu jangan memandang sebelah mata terhadap profesi ini. Nilai-nilai itulah yang nampaknya ingin coba disampaikan oleh Donal Bebek kepada para pembaca tentang arsip dan arsiparis. Walaupun misi yang diemban Donal Bebek dalam komik ini terlihat agak berat dan sangat serius, namun dengan gaya bahasa yang lugas dan ceria sebagai pembaca saya hampir tidak dapat menyadari misi kearsipan dalam cerita ini. Melalui kisah Donal Bebek ini para pembaca dibawa ke dalam dunia kearsipan dimana para arsiparis bekerja luar biasa menjaga aset informasi negara yang tak ternilai harganya. Tidak semua orang bisa menjalankan tugas tersebut dengan mudah. Tak terkecuali Donal Bebek.

Di negeri Belanda, pengenalan generasi muda dengan arsip telah dimulai sedini mungkin. Hal ini dilakukan karena kehadiran arsip berlaku untuk siapa saja, tak hanya untuk generasi tua, namun juga untuk para generasi muda dan anak-anak. Untuk itu, pemerintah berpendapat bahwa pengenalan dunia kearsipan harus dilakukan juga kepada para siswa sekolah dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Namun pengenalan arsip ini harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Komik Donal Bebek ini merupakan salah satu wujud pengenalan dini arsip dan profesi kearsipan ke dunia anak-anak. Ada banyak program interaktif yang sangat menarik untuk anak-anak dan para generasi muda yang disponsori oleh *Nationaal Archief* (Arsip Nasional Belanda) untuk memperkenalkan mereka dengan dunia kearsipan. Salah satunya adalah fasilitasi interaktif di gedung *Nationaal Archief* yang diperuntukkan khusus untuk memperkenalkan arsip dan profesi kearsipan kepada anak-anak dan kaum muda. Fasilitas ini berupa ruangan khusus untuk pendidikan dan penyuluhan anak-anak siswa sekolah dasar sampai ke tingkat menengah yang ingin mengenal arsip dan dunia kearsipan. Seluruh anak-anak usia sekolah dari tingkat dasar sampai dengan menengah dapat menggunakan ruangan serta fasilitas yang ada di dalamnya secara gratis. Penggunaan ruangan ini harus secara berkelompok dengan dibimbing langsung oleh guru sekolah dan satu orang ahli dari *Nationaal Archief*.

Ruangan khusus seperti yang nampak pada gambar 3 adalah ruangan untuk anak-anak yang menyediakan sarana belajar yang sangat variatif dan atraktif, seperti komputer interaktif yang berisi tentang berbagai informasi dasar tentang arsip dan profesi kearsipan, serta dilengkapi

Waandering en selectie | NL... Google Translate... Groepen + Kinderfeestjes | ...

www.gahetna.nl/bezoek/kinderfeestjes

**Een bijzonder kinderfeestje**

Is uw zoon of dochter bijna jarig? Zoekt u een bijzonder verjaardagspartijtje? Kies dan voor een kinderfeestje bij het Nationaal Archief!

**Speurtocht en workshop**

Kinderen van 6 t/m 12 kunnen in het Nationaal Archief hun verjaardag vieren met een spannende speurtocht door het depot waar de archieven worden bewaard. Daarna gaan ze aan een feestelijk verzorgde tafel met één van de leuke doe-opdrachten aan de slag. Voor de jonge is er na afloop een leuke vertoning!

U kunt kiezen uit verschillende doe-opdrachten

- papierscheppen
- een boekje maken
- een eigen oorkonde met waszegel maken

**Schriftjes maken**

**Praktische informatie en reserveren**

- Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
- Max. 12 deelnemers.
- Ervaren workshopbegeleider aanwezig.
- Wij vragen u om per groep voor twee begeleiders te zorgen.
- Aangeboden op woensdagmiddag en in het weekend

Visual Fasilitas kearsipan untuk anak-anak sekolah yang disediakan oleh Nationaal Archief di Belanda

juga dengan alat-alat peraga untuk perawatan arsip. Di dalam ruangan ini, anak-anak diperkenalkan dengan beragam jenis arsip seperti kertas dan dokumen, sejarah bangsa dan tata cara menyimpan dokumen pribadi milik mereka sendiri untuk keperluan masa depan mereka. Selain itu juga mereka diajarkan cara untuk membuat kertas, buku, dan sertifikat yang dilengkapi dengan cap tangan yang mereka buat sendiri dari bahan-bahan daur ulang. Dengan cara sederhana ini, anak-anak dapat berinteraksi dengan dunia kearsipan di tengah suasana yang santai, nyaman, dan menyenangkan.

Misi kearsipan yang dibawa Donal Bebek dan *Nationaal Archief* melalui ruangan pendidikan kearsipan untuk generasi muda di Belanda dibawakan dengan sangat sukses dan inovatif. Donal Bebek dengan gayanya yang lugas, santai dan ceria mengajak para pembacanya, yang mayoritas adalah

anak-anak untuk menyadari pentingnya arsip dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fasilitas ruang pendidikan kearsipan di *Nationaal Archief* juga merupakan sebuah kreasi inovatif untuk anak-anak agar mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan dunia kearsipan dalam suasana yang menyenangkan. Selama ini dunia kearsipan hanya dikenal sebagai dunia yang membosankan, serius dan hanya berhubungan dengan debu dan kertas-kertas tua. Dalam seketika dunia kearsipan melalui Donal Bebek dan fasilitas ruang pendidikan *Nationaal Archief*, semua itu berubah menjadi begitu seru dan menarik untuk dipelajari.

Donal Bebek dan *Nationaal Archief* melalui fasilitas ruang pendidikannya juga telah membuat terobosan baru dalam memperkenalkan arsip kepada anak-anak agar mereka memahami bahwa dunia kearsipan adalah dunia

yang menjadi perantara antara masa lalu, sekarang dan nanti. Seperti argumen Gavin Stevens, di William Faulkner, *Requiem for a Nun*, "Arsip tak hanya cerita tentang masa lalu, tapi arsip adalah masa sekarang dan masa depan". Melalui arsip sebagai jendela dunia di masa lalu, anak-anak dituntun untuk melangkah ke masa depan menuju ke arah yang lebih baik sebagai generasi muda penerus bangsa. Seperti pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah masa lalunya. Masa lalu tersimpan dan terukir di arsip, untuk itu seperti yang dituliskan oleh Nellie McClung, "para generasi penerus bangsa harus mengetahui masa lalunya untuk memahami masa sekarang dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang". Nah...apakah sekarang anda tertarik untuk mengajak anak-anak berkenalan dengan arsip??

Hasna Fuadilla H.

# MEMBANGUN KEMBALI KEJAYAAN

**M**bah Pariah namanya, tujuh puluh tujuh tahun usianya. Itupun jika ingatannya tidak salah, karena ia tidak memiliki satu pun catatan mengenai kelahirannya. Maklum, orang desa zaman dahulu memang belum terlalu peduli dengan urusan catat-mencatat, terutama soal berkas administrasi. Atau bisa jadi memang pengetahuan soal catat-mencatat itu yang belum sampai pada orang-orang desa.

Kakekku adalah penggemar Mbah Pariah sejak dulu, dan tak berubah hingga akhir hayatnya. Aku masih ingat saat kecil dulu aku sering diajak bertamu ke rumah Mbah Pariah oleh kakek hanya untuk mendengarkan kisah-kisah lama di desa ini, termasuk kisah Mbah Pariah saat awal-awal pentas hingga menjadi terkenal. Konon, Mbah Pariah adalah seorang penari lengger yang sangat terkenal pada zaman keemasannya dulu.

Namun, aku tak tahu banyak perihal riwayat penari lengger di desa, bahkan di kotaku. Tak banyak orang yang mau menari lengger saat ini.

Padahal katanya lengger dulu sempat menjadi ciri khas dari tanah kelahiranku ini. Tetapi kini kisah soal kejayaan lengger di kotaku telah menjadi sekadar cerita nostalgia untuk orang-orang yang masih mengenangnya, seperti kakekku salah satunya.

Pagi ini, aku bertamu ke rumah Mbah Pariah dengan membawa sekotak keingintahuan. Namun langkahku terhenti di samping rumahnya, tatkala aku tak sengaja melihat Mbah Pariah tengah menari melalui jendela kamarnya yang terbuka. Sebelumnya, aku belum pernah melihat Mbah Pariah menari satu kalipun. Oleh karena itu, aku sempat tak mempercayai cerita kakekku soal Mbah Pariah. Akan tetapi, semuanya berubah ketika aku menemukan satu kotak berdebu di bawah tempat tidur kakekku. Dan karena alasan itu pula lah, aku bertandang ke rumah Mbah Pariah untuk mendapatkan jawaban soal benda-benda yang ada dalam kotak itu.

"*Cah Ayu*, sejak kapan kamu di situ?" Pertanyaan Mbah Pariah

mengagetkanku. Rupanya ia telah selesai menari, atau menyelesaikannya di tengah jalan dikarenakan menyadari kehadiranku.

"Be... belum lama Mbah. Tadi Ayu mau bertamu ke rumah Mbah, tapi tidak sengaja Ayu melihat Mbah sedang menari," jawabku kaget.

"Masuk saja ke ruang tamu, tunggu Mbah ganti baju dulu."

Aku pun masuk lewat pintu depan yang tidak dikunci. Tidak lama kemudian Mbah Pariah datang ke ruang tamu.

"Ada apa *Cah Ayu*, seperti ada hal yang menjadi beban pikiranmu?," ujar Mbah Pariah tiba-tiba.

"Anu, Ayu masih kaget dengan tarian Mbah tadi. Ayu tak menyangka Mbah masih pandai menari. Ini juga pertama kalinya Ayu melihat Mbah menari," jawabku.

"Ah, seharusnya kamu tidak usah melihat Mbah menari. Mbah sendiri sudah tidak berniat untuk menari di depan orang lain," kata Mbah Pariah.

“Kenapa Mbah?,” tanyaku.

Mbah Pariah pun terdiam sejenak. “Karena Mbah masih takut,” ujar Mbah Pariah lirih. Aku pun terhenyak, tak menyangka bahwa alasan Mbah Pariah tidak mau menari lagi disebabkan oleh rasa takut. Selama ini memang aku sering mendengar cerita kejayaan Mbah Pariah. Tapi tak sekalipun aku pernah melihatnya menari, begitu pula orang tua dan para tanggaku. Maka cerita kehebatan tarian Mbah Pariah pun berlalu seakan telah menjadi mitos belaka.

“Mbah kenapa takut?” ujarku penasaran.

“*Cah Ayu*, masa lalu Mbah tak sebaik itu. Mungkin kalau Mbah ceritakan, kamu tidak akan mengerti. Apalagi di masa itu kamu belum lahir.” kata Mbah Pariah.

“Ayu memang belum mengerti Mbah, tapi Ayu ingin mengerti. Juga soal benda-benda yang ada dalam kotak ini. Tadi Ayu menemukan kotak ini di bawah tempat tidur kakek.” Aku pun menyerahkan kotak yang menjadi sumber dari rasa penasaranku.

Ketika Mbah Pariah membuka kotak tersebut, ia pun terdiam beberapa saat. Tak sengaja kulihat matanya memerah, namun tak ada air mata yang keluar. Tampaknya Mbah Pariah sedang berusaha menahan tangisan.

“Mbah, maaf kalo Ayu membuat Mbah sedih. Jika memang Mbah tak berkenan, Mbah tak usah cerita. Kotak itu juga bisa Ayu bawa pulang lagi,” kataku.

“Tidak apa-apa *Cah Ayu*. Rasanya memang Mbah tidak bisa terus-terusan menghindari dari masa lalu,” jawab Mbah Pariah.

Mbah Pariah mengeluarkan isi kotak tersebut satu persatu. Di dalamnya terdapat beberapa naskah

tembang Jawa dengan tulisan tangan dan sejumlah foto hitam putih dengan kertas yang sudah menguning. Dalam foto-foto tersebut, terlihat Mbah Pariah versi muda sedang menari dalam beberapa acara. Namun yang paling membuatku penasaran adalah foto Mbah Pariah dengan Presiden Sukarno. Hebat sekali Mbah Pariah, orang desa tapi bisa berfoto berdampingan dengan presiden. Tak heran kakekku begitu bangga padanya. Akan tetapi, kenapa Mbah Pariah selama ini seperti menyembunyikan kehebatannya itu?

Mbah Pariah pun mulai bercerita. Semasa kecilnya, Mbah Pariah telah pandai menari. Setiap mendengar suara orang *nembang*, badan Mbah Pariah seolah ingin mengikuti irama tembang tersebut. Orang tua dan orang-orang desa yang melihat bakat Mbah Pariah pun mendukungnya untuk menjadi lengger. Maka dalam waktu singkat, Mbah Pariah pun didaulat menjadi lengger kebanggaan desa.

Pada masa dahulu, sudah lumrah bahwa lengger di setiap desa saling bersaing, terutama untuk merebut perhatian dan simpati kalangan priyayi di tingkat kabupaten, syukur-syukur hingga tingkat provinsi. Semakin tinggi tingkat derajat penontonnya, maka bayaran yang diperoleh akan semakin besar. Maka berlomba-lombalah para lengger untuk mendapatkan orang penting untuk menjadi penonton yang *ketiban sampur*. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah mudah. Terlebih dengan adanya beberapa organisasi masyarakat—biasanya adalah perkumpulan perempuan priyayi—yang tidak menyukai penari lengger karena dianggap sebagai perempuan nakal.

Kondisi tersebut tak membuat Mbah Pariah gentar. Hingga suatu hari, Mbah Pariah diundang ke ibu kota provinsi untuk menari dalam

suatu acara yang dihadiri oleh gubernur dan presiden. Saat itu, Mbah Pariah senang bukan kepalang. Namun, ia sengaja merahasiakannya dari penduduk desa, karena tak mau mendapat tekanan sebelum benar-benar berangkat.

Nampaknya Pak Presiden terkesan dengan tarian Mbah Pariah, sehingga ia pun sempat diundang ke Jakarta untuk menari dalam suatu acara kenegaraan dan mendapatkan penghargaan. “Saat itu Mbah bahagia sekali, rasanya seperti mimpi bisa bertemu dengan Pak Presiden,” ujar Mbah Pariah terharu.

Mbah Pariah kemudian melanjutkan ceritanya. Rupanya Mbah Pariah merahasiakan kepergiannya ke Jakarta, karena tidak ingin menjadi bahan omongan macam-macam. Bagi Mbah Pariah, kebahagiaan seperti itu tidak perlu dipamer-pamerkan. Takutnya menjadi sumber rasa iri hati dari pihak lain. Tampaknya, keputusannya saat itu cukup bijak, karena kondisi politik di Indonesia pun mulai memanas pada pertengahan tahun 1960-an.

Mbah Pariah cukup peka pada kondisi yang mulai memanas. Ia tak pernah menerima tawaran untuk pentas yang tidak jelas siapa tuan rumahnya. Hingga pada akhirnya Mbah Pariah berinisiatif untuk berhenti menari sementara waktu karena kondisi yang mulai berbahaya. Benar saja, tak sampai setahun kemudian terjadi kerusuhan besar-besaran karena ulah suatu organisasi. Banyak penari lengger yang ditangkap dan ditahan karena dianggap sebagai bagian dari organisasi yang kemudian dilarang oleh pemerintah itu.

“Untung saja pada saat itu Mbah berhenti menari, sehingga Mbah selamat,” ujar Mbah Pariah. Tak hanya Mbah Pariah, banyak penari lengger lain yang kemudian berhenti menari dan bersembunyi. Sejak saat itu pula

## CERITA KITA

lah, tari-tarian lengger menghilang dari kota kami.

Akan tetapi, ternyata ada orang yang tidak suka dengan Mbah Pariah. Mbah Pariah dan keluarganya pun difitnah sebagai bagian dari organisasi terlarang. Puncaknya, bapaknya pun diculik oleh orang tak dikenal dan tak pernah kembali lagi, meskipun tak pernah ada bukti yang mengatakan bahwa keluarga Mbah Pariah tergabung dalam organisasi terlarang. Kenyataan itu tak dapat diterima oleh ibu Mbah Pariah, hingga akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Mbah Pariah yang merupakan anak tunggal pun hidup sendiri, karena sanak saudara menjauhinya. Seluruh kejadian tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi Mbah Pariah, sehingga ia mulai mengucilkan diri dan berhenti menari. Bagi Mbah Pariah, saat itu hidupnya telah selesai, seiring dengan kepergian kedua orang tuanya.

“Tapi sekarang Mbah menyesal *Cah Ayu*, karena seharusnya Mbah masih bisa mendapatkan kebahagiaan lewat menari. Mbah juga sedih, karena setelah itu tidak ada lagi penari lengger di desa kita,” kata Mbah Pariah lirih. Tiba-tiba, ia bangkit berdiri dan bergegas pergi ke kamar. Mbah Pariah kembali dengan membawa beberapa lembar kertas.

“Ini adalah penghargaan yang dulu Mbah dapat dari presiden. Sekarang sudah usang begini, mungkin sebentar lagi akan hancur,” ujar Mbah Pariah dengan raut muka sedih. Memang, kertasnya sudah menguning dan sedikit robek, serta tulisannya sudah mulai memudar.

“Mbah, apakah Mbah sekarang sudah mau menari lagi? Karena jika iya, maka Ayu akan senang sekali. Apalagi kalau Mbah mau mengajarkan anak-anak desa untuk menari lengger,” ujarku antusias. Sekilas, kulihat wajah Mbah Pariah ragu-ragu. Namun tiba-

tiba aku melihat anggukan kecil yang diberikan oleh Mbah Pariah.

“Terimakasih, Mbah.”

\*\*\*

Aku terkesan dengan cerita hidup Mbah Pariah. Menemukan kotak itu seperti menemukan harta karun bagiku. Ternyata di dalam kotak itu terdapat foto-foto dan naskah sebagai arsip dan bukti sejarah kehebatan Mbah Pariah, penari lengger legendaris di desa kami. Terlebih dengan adanya sertifikat dari presiden ini, sudah barang tentu tidak akan ada lagi yang meragukan kemampuan Mbah Pariah.

Aku ingin agar orang-orang di kotaku mengetahui cerita kehebatan Mbah Pariah. Maka, aku pun mulai menulis kisah Mbah Pariah dalam sebuah artikel yang kukirimkan ke surat kabar provinsi, dengan harapan kisah tersebut dapat dimuat dan dibaca oleh orang banyak. Tak lupa aku melampirkan *scan* naskah dan foto-foto Mbah Pariah, sebagai bukti arsip perjalanan hidup Mbah Pariah.

Harapanku terkabul, tulisanku ternyata dimuat. Sejak saat itu, telah datang beberapa orang pejabat Pemerintah Daerah ke desa kami untuk bertemu dengan Mbah Pariah. Nampaknya, pemerintah kota/kabupaten tertarik untuk menghidupkan kembali tarian lengger. Terlebih dengan adanya Mbah Pariah sebagai seorang tokoh penari lengger yang kehebatannya tak usah diragukan kembali, berkat arsip-arsip yang dimilikinya. Mbah Pariah pun dengan senang hati mau melatih beberapa orang yang diutus pemerintah kota kabupaten untuk menari lengger.

Nama Mbah Pariah mulai dikenal oleh masyarakat kota kami. Berkat beliau, sekarang telah berdiri beberapa sanggar tari lengger. Bahkan mungkin sebentar lagi tarian lengger dapat kembali menjadi salah

satu ciri khas dari kota kami. Terutama dengan adanya kesadaran terhadap pentingnya kesenian dan kebudayaan, serta penjagaan arsip-arsipnya sebagai bukti pelestariannya.

Arsip-arsip foto, sertifikat, naskah, dan rekaman suara Mbah Pariah dijadikan bukti dari kejayaan tarian lengger oleh pemerintah kota kabupaten. Atas inisiatif Pemda, suara Mbah Pariah yang sedang *nembang* pun direkam agar tetap lestari. Tak hanya itu, ternyata ada orang Pemerintah Daerah yang berhasil menemukan rekaman Mbah Pariah sedang menari di depan presiden dalam arsip film PPFN di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sepeninggalan Mbah Pariah, arsip-arsip tersebut disimpan dan dirawat di Kantor Badan Arsip Kota/Kabupaten. Hal ini dilakukan agar arsip-arsip tersebut dapat terus terjaga dan dapat dimanfaatkan.

Kini Mbah Pariah telah tiada, namun ia telah berhasil mendapatkan kebahagiaannya kembali, setelah berdamai dengan masa lalu. Kini aku mengerti kenapa kakek tetap menyimpan kotak itu begitu lama. Nampaknya kakek ingin agar suatu hari Mbah Pariah dapat memaafkan masa lalunya, dan membangun kembali kejayaannya melalui arsip-arsip yang dimilikinya. Terimakasih kakek, karena telah berhasil membantu Mbah Pariah, dan memberikanku pemahaman tentang betapa pentingnya arsip bagi kehidupan kita, yaitu sebagai bukti dari eksistensi kehidupan manusia.

Ket:

*Cah Ayu*: Anak Cantik

*Tembang*: Sajak/lirik dengan bahasa daerah yang mempunyai irama nada, sehingga sering disebut juga sebagai lagu

*Nembang*: Menyanyikan tembang

*Ketiban sampur*: penonton (biasanya laki-laki) yang diajak menari oleh penari tradisional.

# SOSIALISASI KEBIJAKAN KEARSIPAN UNTUK PIMPINAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN



Sosialisasi kebijakan kearsipan di Kementerian Kesehatan

ARSIP, Jakarta-Sekretaris Utama (Sestama) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sumrahadi hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Kearsipan di Kementerian Kesehatan RI Jl. HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. Acara sosialisasi dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, dan jajaran pimpinan di Gedung Adhyatma lantai 2 Kementerian Kesehatan RI (12/01).

Sestama ANRI menyampaikan tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang telah dicanangkan

oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Agustus silam, sebagai gerakan penyadaran kepada seluruh birokrat pemerintahan tentang arti pentingnya pengelolaan arsip sejak tercipta. Ada 4 (empat) komponen penting yang mendasari suksesnya GNSTA bisa diimplementasikan di setiap Kementerian / Lembaga khususnya di Kementerian Kesehatan, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip dan jadwal retensi arsip. Empat hal tersebut harus semua ditetapkan dan

diimplementasikan ke dalam sistem pengelolaan arsip yang didukung dan diintegrasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) maka tahapan pertama dalam tertib arsip telah dilaksanakan. Selanjutnya setiap SDM di lingkungan Kementerian Kesehatan harus mampu mengelola dan mengolah arsip yang tercipta di setiap unit kerja menjadi daftar arsip aktif dan direkap menjadi daftar informasi publik yang disajikan melalui PPID. Artinya dalam pengelolaan arsip yang baik juga mampu mendukung keterbukaan informasi publik. (ds)

## KUNJUNGAN ANRI KE KOMPAS



Kepala ANRI, Mustari Irawan, menyerahkan buku publikasi kearsipan Khazanah Arsip Kemaritiman kepada Wakil Pemimpin Redaksi Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy

ARSIP, Jakarta-Dalam rangka menjalin silaturahmi dengan media, Pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta jajarannya mengunjungi redaksi harian Kompas (12/01). Tim ANRI diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy. Pada kesempatan itu, Kepala ANRI, Mustari Irawan menyampaikan isu-isu terkini mengenai penyelenggaraan kearsipan nasional diantaranya program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan gerakan. Salah satunya mencanangkan GNSTA sebagai upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip, khususnya

yang terkait dengan arsip birokrasi pemerintahan. Program-program yang berkaitan dengan GNSTA antara lain pembinaan kearsipan, sosialisasi kearsipan, sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bimbingan dan konsultasi kearsipan di seluruh kementerian dan lembaga di setiap daerah, diklat-diklat kearsipan, sertifikasi SDM Kearsipan, akreditasi kearsipan dan pameran-pameran kearsipan.

Pada kesempatan itu, Mustari juga menyampaikan mengenai penyelamatan Arsip Kepresiden. Salah satu tugas penting yang diemban oleh ANRI sebagai lembaga negara adalah menyelamatkan arsip statis, yakni arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dari perjalanan negara dan bangsa ini. Perjalanan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) ini juga tidak terlepas dari peran presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sosok presiden merupakan unsur penting dalam dinamika perkembangan negara, sehingga arsip yang terkait dengan sosok presiden ini harus diselamatkan, dilestarikan dan dimanfaatkan.

Selain GNSTA dan Penyelamatan Arsip Kepresiden, Kepala ANRI, Mustari Irawan juga menyampaikan isu pengelolaan arsip aset dan Pengajuan Arsip Gerakan Non Blok (GNB) sebagai *Memory of the World*. Pada kesempatan itu, Pimpinan ANRI beserta jajarannya mengunjungi ruang redaksi harian Kompas. (sa)



# ANRI SELAMATKAN ARSIP RUSAK AKIBAT BANJIR BANDANG KOTA BIMA



Tim Restorasi ANRI sedang mempraktikkan proses perbaikan arsip yang rusak terkena banjir

ARSIP-BIMA. Tim *Task Force* Penyelamatan Arsip Pasca Bencana ANRI melakukan penyelamatan arsip - arsip yang rusak terkena bencana banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Direktur Preservasi ANRI, Kandar, yang memimpin tim ini mengawali program penyelamatan arsip dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pengarahan, untuk menjelaskan pentingnya penyelamatan arsip, upaya preventif dalam menjaga arsip dan pola penyelamatan jika terjadi musibah atau bencana (14/01). Bimtek ini diikuti oleh para Kepala SKPD, Kepala Sekolah, Lurah dan para staf se-Kota Bima yang nantinya akan diberikan pelatihan oleh Tim Task Force ANRI. Acara ini juga dihadiri

Asisten Bidang Pemerintahan Kota Bima, M. Farid, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima, Ratnawati.

Bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Bima pada 22 Desember 2016 silam bukan hanya menelan korban jiwa dan harta benda, tapi juga memberikan dampak terhadap arsip-arsip yang tersimpan di setiap SKPD dan instansi pemerintahan di Kota Bima. Penyelamatan arsip akibat bencana dilakukan dalam rangka mengantisipasi kerusakan dan kehancuran arsip lebih lanjut dan agar arsip-arsip tersebut mampu disimpan dalam jangka waktu lama. Tim *Task Force* Penyelamatan arsip pasca bencana ANRI juga memberikan

pelatihan kepada setiap perwakilan SKPD agar selanjutnya mampu melakukan penyelamatan arsipnya sendiri.

Tim ini juga melakukan penyelamatan arsip-arsip Kerajaan Mataram yang disimpan di rumah Ibu Siti Maryam dengan melakukan deasidifikasi yaitu proses penghilangan asam pada kertas, dilanjutkan pemberian lapisan *japanese tissue paper* agar struktur kertas lebih kuat, kemudian dilakukan digitalisasi arsip-arsip tersebut. Hasil digitalisasi berupa DVD *Back-up* diserahkan kepada Ibu Siti Maryam dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.

# PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL MASIH MINIM ARSIPARIS



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur didampingi pimpinan ANRI saat membuka acara Rakor Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis

ARSIP-Jakarta. Isu pemenuhan kebutuhan Arsiparis menjadi agenda pembahasan ANRI pada acara Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis dengan tema "Pemenuhan Kebutuhan Arsiparis". Acara Rakor dilaksanakan pada 7 Februari 2017 di Redtop Hotel dan dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Asman Abnur menyampaikan bahwa profesi arsiparis memiliki peran yang sangat vital di negeri ini. "Banyak yang anggap enteng Arsiparis, padahal ini adalah pekerjaan vital. Terbukti banyak daerah yang capaiannya gagal karena datanya

tidak menunjang," jelas Asman saat membuka Rakor Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis di Redtop Hotel Jakarta (7/2).

Kepala ANRI, Mustari Irawan, menyampaikan gambaran kebutuhan arsiparis di Indonesia. "Kondisi kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri sangat memprihatinkan, sehingga perlu di dorong untuk pemenuhan kebutuhan Arsiparis secara nasional", ujarnya. Lebih lanjutnya Mustari menambahkan bahwa kebutuhan Arsiparis secara nasional berdasarkan penghitungan formasi Arsiparis adalah sebanyak 142.760 orang, sementara jumlah

yang ada sekarang baru ada sebanyak 3.252 orang.

Penambahan jumlah Arsiparis pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya tertib arsip. Pengangkatan Arsiparis pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri ditempatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan pada Unit Kerja (Unit Pengolah), Unit Kearsipan, dan Lembaga Kearsipan.

"Itu berarti, membutuhkan komitmen pada setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, dan



Kepala ANRI Mustari Irawan saat memberikan sambutan pada acara Rakor Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis

perguruan tinggi negeri dalam penataan organisasi dan tata laksana. Sejatinya, setiap arsip yang tercipta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus dikelola oleh Arsiparis", tambah Mustari. Jumlah Arsiparis yang dibutuhkan minimal satu orang untuk setingkat eselon III atau eselon II. Pemenuhan kebutuhan Arsiparis harus memanfaatkan peluang yang ada khususnya pegawai honorer yang telah diangkat sebagai PNS, dan dimungkinkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dari Pegawai Negeri Non PNS, yaitu pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja, serta diprioritaskan pada Jabatan Fungsional Umum yang telah melaksanakan kegiatan kearsipan seperti agendaris, sekretaris dan penata usahaan serta Jabatan Fungsional Umum lainnya.

Pemenuhan kebutuhan Arsiparis ini harus dilakukan secara massal

dan masif, seiring sejalan dengan telah dicanangkannya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), dimana salah satu unsurnya adalah tertib dalam penyediaan sumber daya manusia kearsipan khususnya Arsiparis. GNSTA merupakan upaya untuk membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip, khususnya yang terkait dengan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan adalah ujung tombak pergerakan yang bisa diikuti masyarakat, karena itulah birokrasi harus mempunyai kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan kearsipan, dimana kesiapan sumber daya manusia kearsipan khususnya Arsiparis menjadi penggerak utama untuk suksesnya tertib arsip harus disiapkan secara sungguh-sungguh.

Pemenuhan kebutuhan Arsiparis tersebut merupakan tuntutan mutlak sesuai kondisi saat ini sebagaimana

juga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, baik dengan cara pengangkatan pertama, pindah jabatan maupun penyesuaian ataupun inpassing, sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing. Pembina kepegawaian jabatan fungsional Arsiparis di seluruh lembaga negara dan pemerintahan daerah dapat memberi perhatian khusus terhadap jabatan ini mengingat kedudukan dan tugas pokok Arsiparis sangatlah mulia, bukan hanya untuk kepentingan saat ini saja tetapi juga muara dari apa yang para Arsiparis kerjakan nantinya akan dirasakan bagi generasi penerus sebagai penjaga memori kolektif bangsa. (sa)

# HASIL AUDIT KEARSIPAN ANRI, EMPAT INSTANSI BERKATEGORI BAIK

ARSIP-Jakarta. Hasil pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2016, menunjukkan empat instansi memperoleh kategori "BAIK". Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah memperoleh nilai BAIK untuk pemerintahan daerah, sedangkan tingkat kementerian berkategori "BAIK" diraih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Sekretariat Negara.

Tujuh belas Kementerian memperoleh penilaian "Cukup", empat Kementerian memperoleh penilaian "Kurang", sebelas kementerian memperoleh penilaian "Buruk". Hasil pengawasan kearsipan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi diperoleh dua pemerintahan daerah yang memperoleh penilaian "Baik", enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Cukup", enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Kurang". Sedangkan sembilan belas pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Buruk".

Beberapa aspek yang diaudit di bidang kearsipan meliputi kebijakan kearsipan program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan, dan prasarana dan sarana kearsipan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketataatan dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ANRI akan



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan sambutan setelah penyerahan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)

terus melakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Sehubungan dengan itu pada tahun ini ANRI telah menganggarkan untuk mendukung program pengawasan kearsipan tersebut secara nasional, melalui dana dekonsentrasi. Melalui pengawasan kearsipan Kepala ANRI Mustari Irawan berharap dapat terwujud tertib arsip. "Hasil pembinaan dan pengawasan kearsipan nasional ini diharapkan menjadi titik balik sekaligus pemicu bagi setiap lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungannya," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur setelah menyerahkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) mengimbau kepada

seluruh stakeholder penyelenggaraan kearsipan agar terus meningkatkan pengelolaan arsip, mengingat tertib arsip menjadi indikator yang sangat penting dalam akuntabilitas kinerja birokrasi. "Saya meminta agar pengelolaan arsip ini merupakan indikator dan tolok ukur dalam dalam penilaian kinerja pemerintah," jelasnya di Hotel Redtop Jakarta (07/02).

Berikut daftar hasil audit kearsipan pada pemerintahan daerah: Kategori BAIK: 1) Jawa Timur, 2) Jawa Tengah. Kategori CUKUP: 3) DI Yogyakarta 4) Jawa Barat, 5) DKI Jakarta, 6) Kalimantan Timur, 7) Sulawesi Selatan, 8) Bali, 9) Kalimantan Barat. Kategori KURANG: 10) Aceh, 11) Sumatera Barat, 12) Banten, 13) Nusa Tenggara Barat, 14) Jambi. Kategori BURUK: 15) Riau, 16) Sulawesi Tengah, 17) Sumatera Selatan, 18) Kalimantan



Perwakilan empat instansi berkategori "BAIK" dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Sekretariat Negara, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, berfoto bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, dan Kepala ANRI, Mustari Irawan,

Selatan, 19) Bangka Belitung, 20) Papua, 21) Kalimantan Tengah, 22) Lampung, 23) Sumatera Utara, 24) Sulawesi Utara, 25) Bengkulu, 26) Nusa Tenggara Timur, 27) Sulawesi Tenggara, 28) Maluku, 29) Kepulauan Riau, 30) Sulawesi Barat, 31) Gorontalo, 32) Maluku Utara, 33) Papua Barat.

Daftar hasil audit kearsipan di tingkat kementerian: Kategori BAIK: 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2) Kementerian Sekretariat Negara. Kategori CUKUP: 3) Kementerian Luar Negeri, 4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 5) Kementerian Keuangan, 6) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 7) Kementerian Perindustrian, 8) Kementerian Komunikasi dan

Informatika, 9) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 10) Kementerian Kesehatan, 11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 12) Kementerian Pertanian, 13) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 14) Kementerian Sosial, 15) Kementerian Pariwisata, 16) Kementerian Perhubungan, 17) Kementerian Kelautan dan Perikanan, 18) Kementerian Dalam Negeri, 19) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kategori KURANG: 20) Kementerian Agama, 21) Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 22) Kementerian Perdagangan, 23) Kementerian Pertahanan. Kategori BURUK: 24) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 25) Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, 26) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 27) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 28) Kementerian Ketenagakerjaan, 29) Kementerian Pemuda dan Olahraga, 30) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 31) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 32) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 33) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 34) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (sa)

# WUJUDKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANRI DAN KPK BANGUN KERJA SAMA DI BIDANG KEARSIPAN

ARSIP-Jakarta. Fenomena korupsi sudah menjadi permasalahan yang sangat serius di republik ini. Permasalahan korupsi berdampak besar dan meluas, mulai dari kerugian negara sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan secara struktural. Meluasnya fenomenakorupsi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan politik maupun ekonomi oleh *upper power class* dan *upper economic class*. Penguasaan sumber daya politik yang melekat pada posisi jabatan strategis tertentu dalam ruang lingkup kekuasaan kelembagaan negara, merupakan potensi besar untuk mengalokasikan sumber dan fasilitas ekonomi, sesuai dengan kepentingan bisnis pihak penjamin hubungan patronase dengan pemegang kekuasaan.

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan seperti ini semakin menjadi, karena terjadi ketidakefektifan pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan resmi, maupun oleh pranata-pranata demokrasi. Akibatnya, ruang gerak korupsi menjadi semakin meluas dan tak terkendali. Pada akhirnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Situasi korupsi di Indonesia pada saat ini, memang tidak bisa lagi dikategorikan sebagai situasi normal, melainkan sudah melebihi ambang batas toleransi (*Abnormal*). Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindakan koruptif, salah satunya dengan menerapkan sistem penyelenggaraan kearsipan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan tata-pemerintahan yang baik (*good governance*).



Penandatanganan nota kerja sama ANRI dan KPK oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Ketua KPK Agus Rahardjo di Hotel Ambhara, Jakarta

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Kearsipan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penandatanganan nota kerja sama ANRI dan KPK dilaksanakan oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Ketua KPK Agus Rahardjo di Hotel Ambhara, Jakarta (08/02).

"Ini merupakan sejarah besar bagi dunia kearsipan di Indonesia, karena setidaknya-tidaknya memiliki 2 (dua) makna yang khusus, yakni: penyelenggaraan kearsipan secara berkualitas di Kementerian/Lembaga dan Badan-Badan Usaha Pemerintah Dewasa ini tidak lagi sebatas himbauan dan harapan. Namun hal tersebut sudah menjadi tuntutan yang harus diwujudkan serta kewajiban guna

memenuhi aturan-aturan di Bidang Kearsipan", ujar Mustari.

Lebih lanjut Mustari menyampaikan bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama diantara kedua belah pihak, khususnya dalam bidang pembinaan kearsipan meliputi pembinaan penyelenggaraan kearsipan, jasa pengolahan arsip dinamis, penyelamatan arsip yang bernilai guna sejarah (statis) dan juga kerja sama dalam penerapan Sistem Pencegahan Korupsi.

Ketua KPK menyambut baik kerja sama bidang kearsipan ini. Menurut Agus, kerja sama dengan ANRI tersebut sangat bermanfaat bagi KPK dalam meringankan beban permasalahan di bidang dokumentasi. "Bagaimana kami dapat membuat dokumen menjadi ringkas. Misalnya bukan *hard copy* tapi dalam bentuk digital, namun tidak menghilangkan yang otentik," kata Agus. (sa)

# TERTIB ARSIP DIMULAI DARI PARA SEKRETARIS PIMPINAN

ARSIP-Jakarta. Guna meningkatkan pengelolaan arsip pada tata usaha pimpinan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Biro Perencanaan dan Humas melalui Bagian Humas dan Tata Usaha Pimpinan ANRI menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Arsip pada Tata Usaha Pimpinan di Hotel Aston Jakarta (17/02).

Acara Rakor dimaksudkan sebagai upaya mensinergikan program pengelolaan arsip di lingkungan tata usaha pimpinan. Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi, menambahkan bahwa Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Pada Tata Usaha Pimpinan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program peningkatan layanan ketatausahaan pimpinan khususnya mengenai pengelolaan arsip pada tata usaha pimpinan.

“Karena kita ketahui bersama bahwa ANRI sebagai lembaga yang strategis sehingga diharapkan SDM ANRI khususnya, memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara baik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan”, jelasnya.

Sementara Kepala Biro Perencanaan dan Humas Syaifuddin mengimbau kepada seluruh peserta untuk meningkatkan kinerja pengelolaan arsip. “Mereka (para pengelola arsip) tidak hanya memberikan pelayanan teknis saja, akan tetapi juga harus mampu menjadi pusat informasi instansi atau lembaga



Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Arsip pada Tata Usaha Pimpinan di Hotel Aston Jakarta (17/02)

melalui penyiapan bahan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan sehingga harus di dukung oleh kemampuan pengelolaan arsip yang baik”, ujarnya.

Materi Rakor yang disampaikan meliputi: “Peningkatan Kinerja Sekretaris dalam rangka menunjang Pengelolaan Arsip di Lingkungan TU Pimpinan” serta internalisasi SOP Layanan Ketatausahaan Pimpinan” disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan TU Pimpinan ANRI, Gurandhyka. Kepala Bagian Arsip ANRI, Prihatni Wuryatmini menyampaikan materi “Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif”. Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian ANRI, Rita Yuniati menyampaikan materi “Peningkatan Disiplin Pegawai dalam

rangka menunjang Pengelolaan Arsip di lingkungan TU Pimpinan”.

Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip pada Tata Usaha Pimpinan ini berjumlah 40 orang, yang terdiri dari sekretaris dan pengadministrasi ketatausahaan di lingkungan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, para arsiparis yang bertugas sebagai Pengelola *Central File* (PCF) dan perwakilan dari Pusdiklat Kearsipan, Inspektorat, Pusat Akreditasi Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, Balai Arsip Tsunami Aceh. (sa)

# ANRI DAN KOMPAS TV TANDATANGANI KERJASAMA PUBLIKASI MEDIA SOSIAL



Penandatanganan nota kerja sama oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Direktur Digital Kompas TV Karaniya Dharmasaputra

ARSIP-Jakarta. ANRI dan Kompas TV melakukan penandatanganan kerjasama dalam publikasi media digital dan media sosial di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari Gedung C Lantai 2. Kepala ANRI Mustari Irawan mengatakan pentingnya ANRI menguatkan publikasi kelembagaan salah satunya dengan kerjasama media Kompas TV agar ANRI semakin dikenal masyarakat. Keberadaan media sosial mampu memperlebar kesempatan untuk berdialog dengan masyarakat, bertukar pikiran, berbagi pengetahuan dan informasi. Hal ini

akan mendekatkan ANRI kepada masyarakat untuk lebih dikenal lebih luas. Direktur Digital Kompas TV Karaniya Dharmasaputra mengatakan bahwa perkembangan dunia digital sangat cepat dan media *mainstream* harus mampu mengikuti perkembangan teknologinya. Saat ini media sosial berkembang dengan *trending live video streaming* yang dapat diakses secara *real time* sesuai apa yang diprediksikan oleh CEO Facebook Mark Zuckerberg bahwa teknologi *live video streaming* akan menjadi kekuatan baru di media

sosial dan media digital. Selanjutnya *Launching Video Digital Kerjasama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kompas TV*. Kerjasama ANRI dan Kompas TV dilakukan dalam publikasi pembuatan video dokumenter Ali Sadikin saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 1966-1977.

Agenda Selanjutnya, Karaniya Dharmasaputra mengunjungi Pameran Arsip di Loby Gedung C lantai 1 dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa.



# ANRI DAN DINAS KEARSIPAN SUMATERA SELATAN SELENGGARAKAN SOSIALISASI PENGAWASAN KEARSIPAN



Peserta Sosialisasi Pengawasan Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

ARSIP-Palembang. Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Kearsipan (22/02). Peserta sosialisasi diikuti oleh Kepala Lembaga Kearsipan se-Provinsi Sumsel. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa, secara resmi membuka kegiatan rapat sosialisasi program pengawasan kearsipan se-Sumsel

Imam Sentosa menyampaikan arti pentingnya arsip. "Sumsel memahami arti pentingnya arsip, dengan adanya lembaga kearsipan yang berdiri sendiri. Suatu kegiatan harus lengkap

arsipnya, jangan sampai ada yang ketinggalan", ujarnya.

Lebih lanjut Imam Sentosa menambahkan bahwa sangat keliru apabila arsip dipandang sebelah mata. "Pemerintah Sumsel siap mensukseskan kegiatan tata arsip di Sumsel. Semua SKPD memiliki arsip dan harus membuat skema tentang pengelolaan arsip. kalau berhadapan dengan aparat hukum yang ditanyakan arsipnya", tambahnya.

Sementara itu Kepala Pusat Akreditasi Rudi Anton mengapresiasi kegiatan sosialisasi pengawasan kearsipan. "Kita sangat mengapresiasi Pemerintah Sumsel yang sudah memfasilitasi. Palembang menjadi kota

yang pertama dan minggu depan akan dilanjutkan ke-33 provinsi lainnya," ungkapnya.

Rudi Anton menyampaikan bahwa audit kearsipan dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kondisi penyelenggaraan kearsipan di seluruh daerah.

"Ini akan jadikan percontohan bagi sosialisasi selanjutnya di 33 Provinsi, apalagi Sumsel sendiri kearsipannya berdiri sendiri, dan dilaksanakan langsung pejabat setingkat Eselon II, ini membuktikan bahwa Sumsel sangat serius terhadap permasalahan kearsipan " ujarnya. (MI/SA)

# ANRI TERIMA PERBAIKAN ARSIP YANG TERKENA DAMPAK BANJIR DI JABODETABEK

ARSIP-Jakarta. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 huruf (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan bencana adalah pemeliharaan arsip. Hal tersebut pun dipertegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kemudian melalui Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana juga diatur mengenai penyelamatan arsip dari dampak bencana yang menimpa masyarakat sehingga hak keperdataan rakyat terlindungi.

Dalam hal bencana banjir, ANRI menerima layanan perbaikan arsip ijazah dan sertifikat tanah bagi seluruh masyarakat akibat banjir, khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tanpa dipungut biaya. Layanan perbaikan arsip ini dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 08.30 – 16.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2017.

Menyikapi terjadinya berbagai bencana alam di beberapa wilayah Indonesia seperti banjir di Bekasi, Tangerang, serta daerah lainnya, Kepala ANRI Mustari Irawan menghimbau kepada seluruh *stakeholder* bidang kearsipan untuk cepat tanggap memperbaiki kerusakan arsip akibat bencana banjir. "ANRI mengharapkan kepada seluruh Kepala Lembaga Kearsipan Provinsi, Kepala Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pencegahan dan tindakan penyelamatan arsip dari dampak bencana secara cepat dan tepat, sehingga potensi bahaya terhadap rusaknya arsip negara dari bencana dapat diminimalkan", jelasnya dalam konferensi pers (01/03). Selain itu, ada beberapa langkah-langkah guna



ANRI menyelenggarakan Konferensi Pers Perbaikan Arsip yang Terkena Dampak Banjir di Jabodetabek

penyelamatan dan pelindungan arsip ketika terjadi bencana, khususnya bencana banjir, yaitu: a) Mengevakuasi arsip ke tempat yang aman; b) Membersihkan arsip dari lumpur/kotoran menggunakan air bersih; c) Menyemprotkan larutan alcohol 70% atau ethanol ke seluruh permukaan arsip secara merata; d) Mengurai lembaran arsip secara hati-hati; e) Mengeringkan arsip menggunakan kipas angin di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung.

Sementara itu Direktur Preservasi, Kandar, menceritakan pengalamannya selama menangani arsip yang rusak akibat bencana banjir. "Sepanjang tahun 2016-2017 ANRI melalui kegiatan di Direktorat Preservasi melakukan program kerja pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari penyediaan layanan restorasi arsip yang terkena dampak banjir bagi masyarakat Jabodetabek hingga penerjunan Tim Reaksi Cepat ANRI ke lokasi bencana untuk menangani arsip milik Pemerintah Daerah dan masyarakat", ujarnya.

Tahun 2016, ANRI menerjunkan Tim Reaksi Cepat gempa bumi di

Kabupaten Puworejo, banjir bandang di Garut dan Kabupaten Pidie Jaya Aceh. Tim Reaksi Cepat juga melakukan proses edukasi, advokasi, dan restorasi arsip sehingga diharapkan di masa yang akan datang jika terjadi bencana serupa LKD telah mampu melakukan proses penanganan arsip yang terkena dampak bencana secara tepat dan terarah. Selain itu juga ANRI melakukan penyelamatan arsip milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut Mustari menjelaskan Tim Taskforce ANRI yang terjun langsung ke Kota Bima untuk memperbaiki arsip yang rusak akibat banjir bandang. "Ketika Kota Bima dilanda banjir bandang pada awal tahun 2017, ANRI tidak hanya menyelamatkan arsip akan tetapi juga melakukan edukasi dan advokasi mengenai pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana. Sehingga LKD mampu mendirikan posko layanan perbaikan arsip yang terkena dampak banjir bandang bagi masyarakat dan pemerintah daerah", jelasnya. (sa)

# LOGO BARU SEMANGAT BARU HARAPAN BARU

Logogram merupakan bentuk simplifikasi perpaduan dari deretan arsip dan *timeline* sejarah. Bentuk deretan arsip tidak hanya menunjukkan bahwa jenis arsip berupa lembaran dokumen, tetapi lengkungan deretannya memperlihatkan bahwa arsip juga dalam bentuk pita audio maupun audio visual. Selain itu deretan tersebut menunjukkan rentetan bukti akuntabilitas yang terjaga dengan baik dari tahun ke tahun.





ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEMPERSEMBAHKAN

# Mars *Kearsipan Indonesia*

Cipt.: L. Agus Wahyudi Minarko

Aransemen : Tim Paduan Cipta Selaras Pimpinan Addie M.S.

## Bait (1)


Kami lembaga kearsipan Republik Indonesia  
Penuh semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan  
Tak kenal lelah kembangkan diri, terus berinovasi  
Melestarikan memori bangsa, wujud dharma bhakti pada negri

*bridge* Kami menjamin tersedianya arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja  
Mampu hadapi segala tantangan bangga jadi bangsa Indonesia

*Reff* Lembaga kearsipan Republik Indonesia junjung tinggi identitas bangsa  
Jaga warisan nasional dan budaya demi kejayaan Indonesia  
Kearsipan Republik Indonesia

## Bait (2)

Kami lembaga kearsipan Republik Indonesia  
Siap membangun bidang kearsipan, sebagai jati diri bangsa kita  
S'lalu responsif antisipatif bersikap profesional  
Sinergikan semangat perubahan satukan langkah dalam berkarya  
Kembali ke *bridge* dan *reff*



\*Lagu Mars Kearsipan Indonesia dapat diunduh  
di channel Youtube Arsip Nasional Republik Indonesia